

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**RENCANA STRATEGIS
2021-2026**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra DPM & PTSP ini memuat Visi dan Misi Kota Banjarbaru yang selaras dengan arah kebijakan, program dan kegiatan DPM & PTSP dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi, Program Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru.

Kami menyadari bahwa bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami mengharapkan pihak-pihak terkait dapat memberikan saran untuk penyempurnaan Renstra ini. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Banjarbaru, September 2021

Kepala DPM & PTSP Kota Banjarbaru

Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700503 199003 2 002





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPM&PTSP	17
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	17
2.2 Sumber Daya DPM&PTSP	36
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM&PTSP	55
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPM&PTSP	65
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPM&PTSP	68
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPM&PTSP	68
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	71
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	76
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	79
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	91
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	93
4.1 Tujuan dan Sasaran	93





BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	96
	5.1. Strategi dan Kebijakan	96
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	98
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	98
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	102
	7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	102
BAB VIII	PENUTUP	107
	8.1. Pentup	107



DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN BAGAN

Gambar 1.1	Skema Pengintegrasian PUG dan Penganggaran Daerah.....	4
Gambar 1.2.	Proses Penyusunan Renstra DMP&PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026	6
Gambar 1.3.	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	7
Gambar 1.4.	Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja DPM&PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.....	8
Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai DPM&PTSP Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan Tahun 2021.....	37
Tabel 2.2.	Rincian Pegawai DPM&PTSP Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan Tahun 2021.....	38
Tabel 2.3.	Sarana dan Prasarana DPM&PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2021	43
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM&PTSP Tahun 2016-2020 .	58
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPM&PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020.....	59
Tabel 2.6.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPM&PTSP	66
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan DPM&PTSP Kota Banjarbaru	69
Tabel 3.2.	Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026	74
Tabel 3.3.	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Badan	
	Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024.....	77
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran, Jangka Menengah DPM&PTSP.....	95
Tabel 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	97
Tabel 6.1.	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	99





Tabel	7.1. Indikator Kinerja Program DPM&PTSP Kota Banjarbaru Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.....	103
Tabel	7.2. Indikator Kinerja Kegiatan DPM&PTSP Kota Banjarbaru Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah Kota Banjarbaru dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mencakup urusan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang andal dan professional perlu membaca peraturan perundangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Banjarbaru, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan Standart Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2011, yang meliputi : 1). Kebijakan Penanaman Modal 2). Kerjasama Penanaman Modal 3). Promosi Penanaman Modal 4). Pelayanan Penanaman Modal 6). Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 7). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang isinya antara lain meliputi : 1). Pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan public 2). asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik 3). pembinaan dan penataan pelayanan public 4). hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik 5). aspek penyelenggaraan pelayanan

- publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja 6). peran serta masyarakat 7) penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan 8). Sanksi;
3. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Banjarbaru yang bertugas dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, DPM&PTSP harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Kota Banjarbaru sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

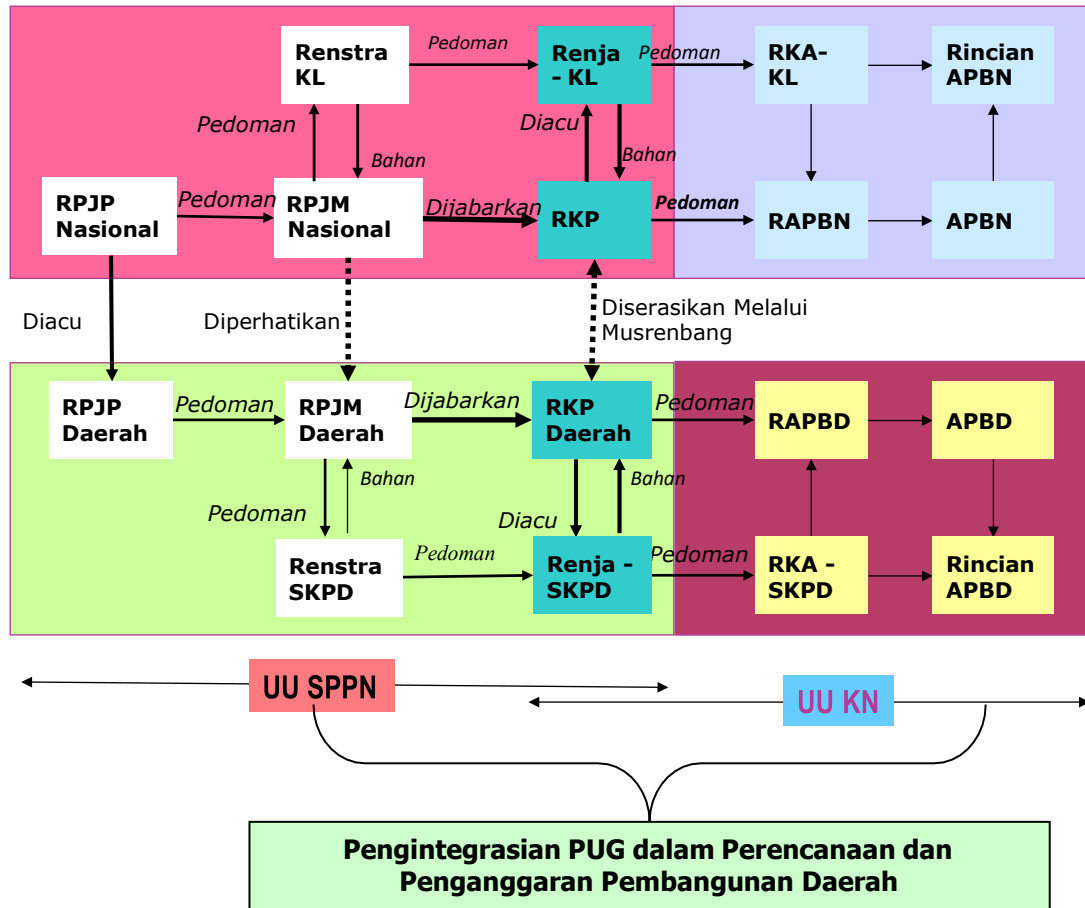
Siklus pembangunan daerah diawali dengan perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah dan evaluasi serta pelaporan pembangunan daerah. Kedudukan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mengintegrasikan PUG dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengintegrasian Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan terbagi dalam 3 (tiga) hal yaitu perencanaan secara spesifik memecahkan kesenjangan gender, perencanaan yang secara afirmatif menyelesaikan kesenjangan gender dan perencanaan yang secara *mainstream* (mengarusutamakan) memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan penetapan APBD. Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perencanaan pembangunan meliputi Rencana Strategis OPD (RENSTRA OPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, dan Rencana Kerja (RENJA) OPD yang merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD).

Pada tahapan perencanaan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, RENSTRA OPD dan RENJA OPD. Perencanaan pembangunan yang responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 67 Tahun 2011). Pengintegrasian PUG mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-OPD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian APBD, skema dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1

Skema Pengintegrasian PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah



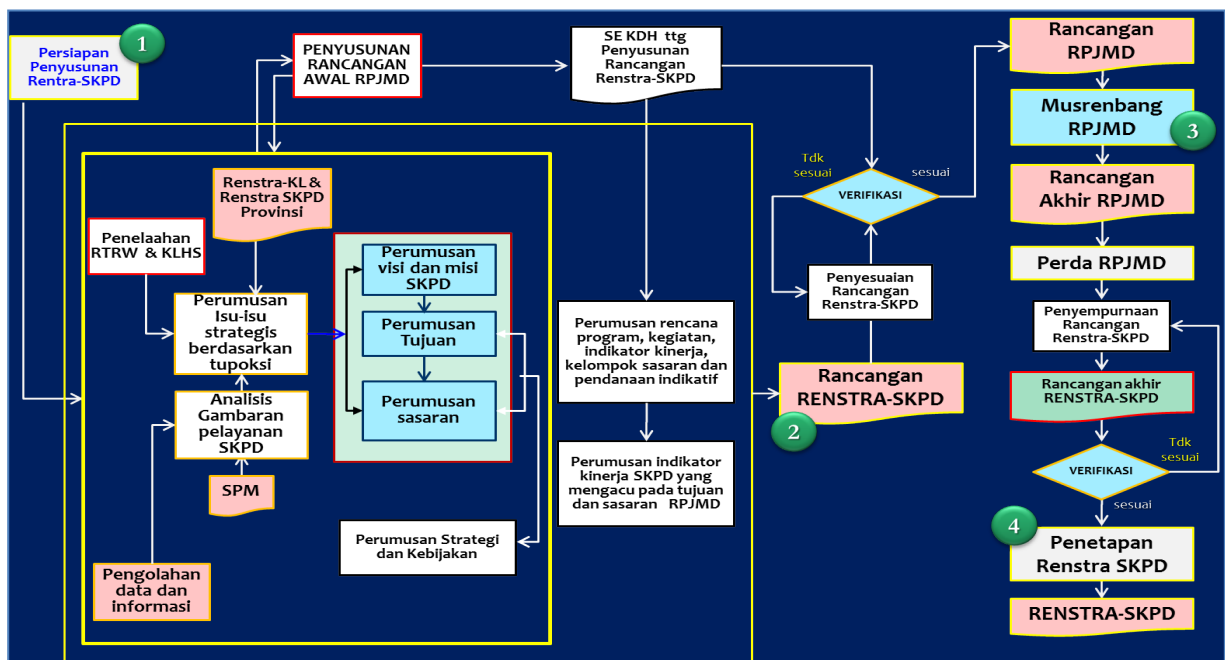
Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026, selanjutnya setiap perangkat daerah di Kota Banjarbaru diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru 2021-2026. Mendasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum

perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Kepala Dinas selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru. Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2



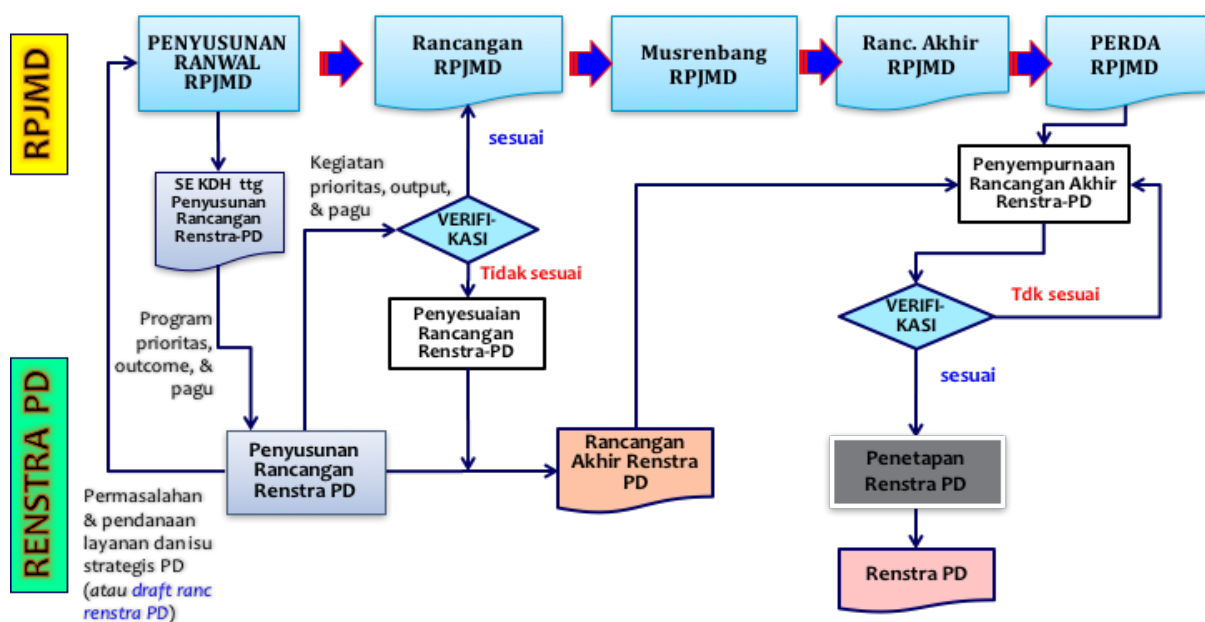
Gambar 1.2

Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 (Sumber: Kemendagri, 2010)

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang

diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Dokumen Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

Gambar. 1.3



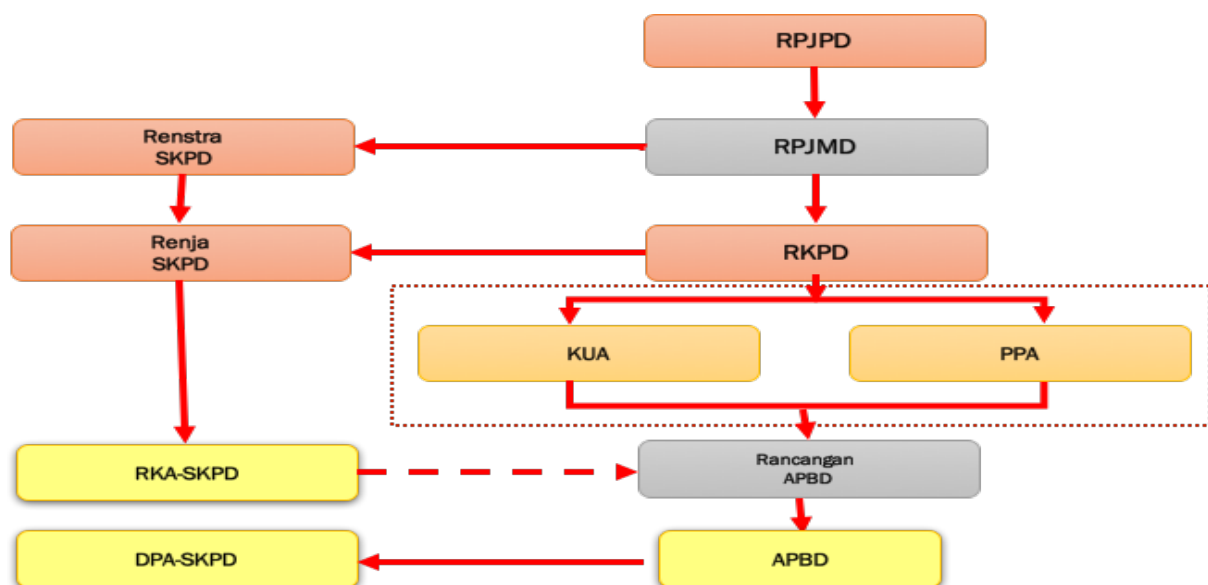
Gambar 1.3

Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Sumber: Kemendagri, 2017)

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.

Gambar 1.4



Gambar 1.4

Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 (Sumber: Kemendagri, 2017)

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (menunggu dari Provinsi);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2023;
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 ;
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 ;
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru ;

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang (nama urusan) di Kota Banjarbaru, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu; “ **BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA**”

1.3.2. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan

untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarbaru, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya DPMPTSP baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI (DPMPTSP)

2.1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
3. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

2.1.1.1. Tupoksi Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan

kerjasama dengan perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Pembinaan, pengendalian, pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2. Tupoksi Sekretariat Dinas

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2.1. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan penatausahaan administrasi umum dan perkantoran, tata persuratan kearsipan dan rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi antar unit kerja dan unsur-unsur lainnya yang memerlukan;
- c. Menyelenggarakan rencana dan pengelolaan peralatan kantor, bahan, pemeliharaan kantor beserta alat peralatan kantor dan fasilitas kantor lainnya;
- d. Menyelenggarakan administrasi tata usaha kepegawaian, pengembangan pegawai, pengembangan karier dan administrasi jabatan fungsional;
- e. Menyelenggarakan, menyusun dan membuat analisa serta mengkoordinasikan kebutuhan dan formasi pegawai;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan/pengurusan pensiun pegawai, karpeg, karis/karsu, taspen serta dokumen kepegawaian lainnya;
- g. Menyelenggarakan koordinasi antar unit kerja dan instansi terkait ataupun instansi lain di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. Menyelenggarakan, melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala, kepala sekretariat ataupun tugas lainnya yang berhubungan dengan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1.1.2.2. Tugas Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja rutin dan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. mengatur dan mengawasi perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai tugas sub bagian perencanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. melaksanakan koordinasi, mengatur dan mengawasi pengelolaan laporan;
 - e. membuat telaahan kepada atasan sesuai tugas sub bagian perencanaan;
 - f. membuat rancangan konsep surat rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan sub bagian perencanaan;
 - g. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
 - h. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan;
 - i. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
 - j. menilai hasil kerja bawahan sesuai kerja yang dicapai;
 - k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2.1.1.2.3. Tugas Sub bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pembukuan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan;
- b. Mengatur dan mengawasi bendaharawan pengeluaran, bendaharawan penerima dan pengelola keuangan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Membuat laporan keuangan berdasarkan bahan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai tugas sub bagian keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Melaksanakan koordinasi, mengatur dan mengawasi pengelolaan laporan;

- f. Membuat telaahan kepada atasan sesuai tugas sub bagian keuangan;
 - g. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan keuangan;
 - h. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan;
 - i. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan;
 - j. Melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
 - k. Menilai hasil kerja bawahan sesuai kerja yang dicapai;
 - l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2.1.1.3. Tupoksi Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dibidang Penanaman Modal dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- b. pengkajian dan perumusan bahan penetapan kebijakan rencana pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- c. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal;
- d. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
- e. Pembuatan peta potensi investasi;
- f. pengkajian terhadap upaya promosi dalam menarik investasi;
- g. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.1. Tugas Seksi Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja Seksi Pengendalian Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sesuai dengan program kerja bidang Penanaman Modal dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja Seksi Pengendalian Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. mendistribusikan tugas kepada pelaksana untuk urusan pengumpulan data dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas di maksud;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. menyusun bahan pengkajian bimbingan pelaksanaan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;
- f. menyusun bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan penanaman modal;
- g. menyusun peta investasi daerah Kota Banjarbaru dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
- h. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;

- i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- j. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.1.3.2. Tugas Seksi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Penanam Modal

- a. menyusun program kerja Seksi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi sesuai dengan program kerja Bidang Penanaman Modal dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja seksi Penyelenggaraan promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. mendistribusikan tugas kepada pelaksana seksi Penyelenggara promosi dan Kerjasama Penanaman Modal untuk urusan pengumoulan data dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Promosi dan Kerjasama serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas dimaksud;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan promosi baik dalam maupun diluar negeri;
- f. menyusun bahan pengkajian pengkoordinasian dan pelaksanaan pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak maupun media elektronik;

- g. menyusun bahan pengkajian perumusan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
- h. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- j. membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan materi perjanjian dalam rangka kerjasama di bidang penanaman modal dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.1.4. Tupoksi Bidang Pelayanan Perizinan

- 1. Bidang Pelayanan perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi pekerjaan teknis bidang pelayanan perizinan.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang Pelayanan perizinan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program di bidang Pelayanan Perizinan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 - b. perumusan pedoman dan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan;
 - c. Pelaksanaan pengadministrasian, pengolahan perizinan jasa usaha, reklame dan ketataruangan;
 - d. Pelaksanaan survey dan pengawasan perizinan ketataruangan;

- e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - f. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.1.1.4.1. Tugas Seksi Pendataan dan Survey Perizinan Ketataruangan

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pendataan Dan Survey Perizinan Ketataruangan ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pendataan Dan Survey Perizinan Ketataruangan;
- c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di Seksi Pendataan Dan Survey Perizinan Ketataruangan;
- d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Pengawasan Seksi Pendataan Dan Survey Perizinan Ketataruangan;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendataan Dan Survey Perizinan ketataruangan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pelaksana di Seksi Pendataan Dan Survey Perizinan Ketataruangan untuk urusan pengumpulan data dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Survey serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas di maksud;
- g. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;

- h. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- j. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas Pendataan Dan Survey Perizinan ketataruangan;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.1.4.2. Tugas Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan ;
- c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan;
- d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Pengawasan Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pelaksana di Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan untuk urusan pengumpulan data dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan

- koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Administrasi Pelayanan Perizinan serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas di maksud;
- g. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
 - h. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
 - i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
 - j. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan;
 - k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.1.5. Tupoksi Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu

1. Bidang Pelayanan perizinan tertentu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi pekerjaan teknis bidang pelayanan perizinan tertentu.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan perizinan tertentu mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang Pelayanan Perizinan Tertentu dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. perumusan pedoman dan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan tertentu;

- c. pelaksanaan pengadministrasian, pengolahan Izin Paket, Izin Prinsip, Izin Usaha Penanaman Modal, Izin Mendirikan Bangunan, Penyelenggaraan Reklame, SITU dan HO;
- d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan reklame;
- e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
- f. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- g. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan tertentu;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.1.1.5.1. Tugas Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal;
- c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal ;
- d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Pengawasan Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal;
- f. mendistribusikan tugas kepada pelaksana di Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal untuk urusan pengumpulan data dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi, pengawasan

- dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal Pendataan serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas di maksud;
- g. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
 - h. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
 - i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
 - j. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas Pendataan Dan Survey Perizinan ketataruangan;
 - k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.1.5.2. Tugas Seksi Evaluasi dan Monitoring Perizinan Reklame

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Seksi Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame;
- c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di Seksi Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame;
- d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Pengawasan Seksi Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perizinan reklame;

- f. mendistribusikan tugas kepada pelaksana di Seksi Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame untuk urusan pengumpulan data dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Perizinan Reklame serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas di maksud;
- g. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- h. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- j. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.1.6. Tupoksi Bidang Informasi dan Pengaduan

- 1. Bidang Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi pekerjaan teknis pengelolaan data dan informasi perijinan serta penanganan pengaduan.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang Informasi dan pengaduan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- b. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang data, informasi dan teknologi informasi serta penanganan pengaduan;
- c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan data, informasi dan teknologi informasi serta dan penanganan pengaduan;
- d. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- e. Pengolahan data dan informasi perijinan dan non perijinan yang terintegrasi;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Informasi dan Pengaduan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.6.1. Tugas Seksi Data dan Informasi

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Data dan Informasi Perizinan;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Data dan Informasi Perizinan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di seksi Data dan Informasi Perizinan;
- d. menyusun bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang data dan informasi Perizinan;
- e. menyusun bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang data dan informasi Perizinan;
- f. menyusun bahan pengkajian perumusan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
- g. menyusun bahan pengkajian pemutakhiran data dan informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;

- h. menyusun dan penyediaan data pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkala dan insidentil;
- i. menyusun bahan pengkajian sosialisasi sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- j. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- k. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- l. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai
- m. membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi data dan informasi perizinan ;
- n. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

2.1.1.6.2. Tugas Seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan;
- d. menyusun bahan pengkajian penyelenggaraan pelayanan Penerimaan dan Penanganan pengaduan;
- e. menyusun bahan pengkajian sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;

- f. menyusun bahan pengkajian penyelesaian pengaduan;
- g. menyusun bahan pengkajian penyelenggaraan penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- h. menyusun bahan pengkajian perumusan sistem pelayanan informasi, keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara elektronik dan manual;
- i. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- j. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- k. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai
- l. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi data dan informasi perizinan;
- m. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

2.1.1.7. Tim Teknis

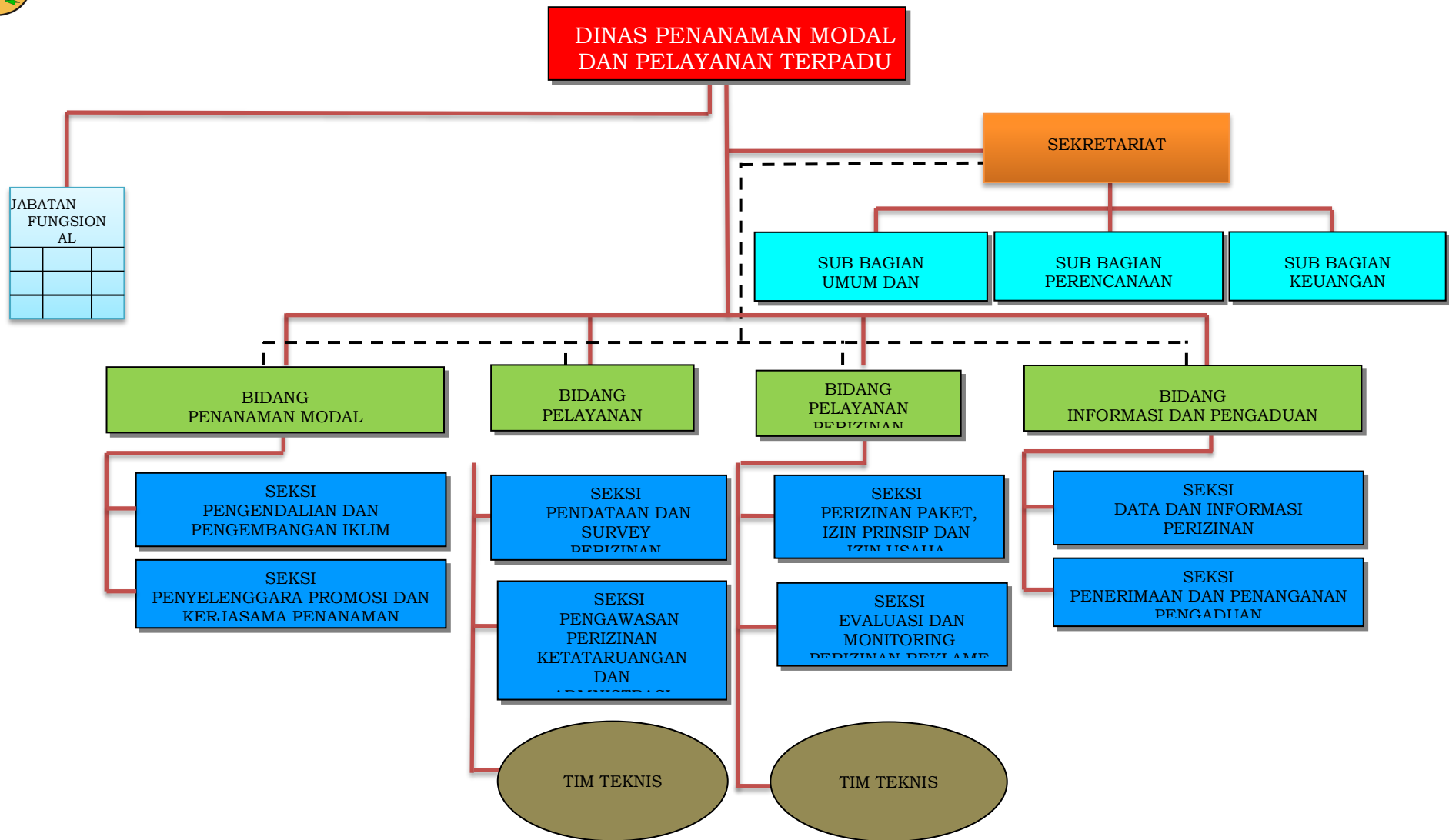
- 1. Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya, dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2. Tim Teknis memiliki wewenang untuk memberikan saran dan pertimbangan diterima dan/atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti yang tercantum Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru meliputi:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas yang terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Penanaman Modal terdiri atas :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengendalian Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
4. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi Tim Teknis terdiri atas:
 - a. Seksi Pendataan dan Survey Perizinan Ketataruangan;
 - b. Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan;
5. Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu membawahi Tim Teknis terdiri atas:
 - a. Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal;
 - b. Seksi Evaluasi dan Monitoring Perizinan Reklame;
6. Bidang Informasi dan Pengaduan terdiri atas:
 - a. Seksi Data dan Informasi Perizinan;
 - b. Seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



KETERANGAN :

———— : Garis Komando
 - - - - : Garis Koordinasi

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusi

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumberdaya manusia secara optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi.

Sumber daya manusia antara perempuan dan laki-laki itu berbeda, baik dari segi biologisnya maupun dari konstruksi sosial budayanya. Perbedaan tersebut melahirkan perbedaan kebutuhan antara keduanya. Dalam upaya agar pembangunan mampu merespons perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, maka isu-isu gender harus terintegrasi dalam program-program pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh 63 pegawai yang terdiri dari 16 pegawai laki-laki dan 16 orang pegawai perempuan. Jika dilihat berdasarkan golongan, jumlah pegawai golongan II sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 21 orang, dan golongan IV sebanyak 10 orang. Sementara itu, dari sisi latar belakang pendidikan, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan pendidikan SMA sebanyak 3 orang, pendidikan D3 sebanyak 3 orang, pendidikan S1 sebanyak 16 orang, pendidikan S2 sebanyak 6 orang, dan S3 sebanyak 1 orang. Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan, Tahun 2021

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	33	52,38
		Perempuan	30	47,62
2.	Golongan	Golongan I	-	-
		Golongan II	1	1,59
		Golongan III	21	33,33
		Golongan IV	10	15,87
3.	Pendidikan	SMP	-	-
		SMA	13	20,63
		D3	5	7,94
		S1	34	53,97
		S2	10	15,87
		S3	1	1,59

Tabel 2.2

Rincian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan, Tahun 2021

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
1.	Dr. Hj. Rahmah Khairita,MM	Perempuan	Pembina Utama Muda (IV/c) 01 April 2018	Kepala Dinas	S3 Administrasi Publik / 2014	DIKLATPIM III, ADUM	
2.	Muhyar Lutfi,S.Sos	Laki-laki	Pembina Tingkat I (IV/b) 01 April 2015	Sekretaris	S1 FISIP / 1996	DIKLATPIM III, ADUM	
3.	Drs.Linda Septiana	Perempuan	Pembina (IV/a) 01 Oktober 2009	Kepala Bidang Pelayanan Perijinan	S1 Ekonomi / 1989	DIKLATPIM III, ADUMLA, ADUM	
4.	Dra SL Setya Rochani,MAP	Perempuan	Pembina (IV/a) 01 April 2010	Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan	S2 Manajemen Sumber Daya Manusia / 2005	ADUM	
5.	Drs. Widodo Fatchuraji,MM	Laki-laki	Pembina (IV/a) 01 Oktober 2010	Kepala Seksi Evaluasi dan Monitoring Perizinan Reklame	S2 Manajemen Sumber Daya Manusia / 2010	ADUM	
6.	Drs. Akhmad Rosny Noor,MM	Laki-laki	Pembina (IV/a) 01 April 2011	Kepala Seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan	S2 Magister Sumber Daya Manusia / 2010	ADUM ADUMLA	

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
7.	Zulkarnain,S.Sos,MM	Laki-laki	Pembina (IV/a) 01 April 2012	Kepala Seksi Pendataan dan Survey Perizinan Ketataruangan	S2 MSDM / 2011	ADUM	
8.	Hj. Ernita Mahyuhana,Spt.MAP	Perempuan	Pembina (IV/a) 01 Oktober 2012	Kepala Seksi Data dan Informasi Perizinan	S2 Manajemen Pembangunan Daerah / 2007	DIKLATPIM IV	
9.	Drs. Deddy Haryadi.M.AP	Laki-laki	Pembina (IV/a) 01 Oktober 2014	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu	S2 Administrasi Publik / 2008	ADUM	
10.	H. M. Maulana,ST	Laki-laki	Pembina (IV/a) 01 April 2018	Kepala Bidang Penanaman Modal	S1 Teknik Sipil / 2004	DIKLATPIM IV	
11.	Darma Satria,SE	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d) 01 April 2012	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	S1 Akuntansi / 1998	DIKLATPIM IV	
12.	Ajidan Nor,SE	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d) 01 Oktober 2016	Kepala Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan	S1 Manajemen / 2009	DIKLATPIM IV	
13.	Yusfian Noor,S.Sos	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d) 01 Oktober 2016	Sub Bagian Keuangan	S1 Ilmu Administrasi Niaga	DIKLATPIM IV	

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
14.	GINNA GRACE SHANTY,SE,MM	Perempuan	Pembina (IV/a) 01 April 2021	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S2 Manajemen Sumber Daya Manusia / 2010	DIKLATPIM IV	
15.	ASNI WARTINAH,SE,MM	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d) 01 April 2019	Kepala Sub Bagian Perencanaan	S2 Manajemen Akuntansi Pemerintahan / 2012	DIKLATPIM IV	
16.	NORSAILEN,SE,MSi	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d) 01 April 2019	Kepala Sub Bagian Keuangan	S2 Manajemen SDM / 2009	DIKLATPIM IV	
17.	HAYATI,S.Sos	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d) 01 April 2020	Kepala Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal	S1 Ilmu Administrasi Negara	DIKLATPIM IV	
18.	MUHAMMAD DENY PRAMUDJI,ST	Laki-laki	Penata (III/c) 01 April 2019	Kepala Seksi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	S1 Teknik Sipil / 2008	DIKLATPIM IV	

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Golongan	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat	
						Struktural	Fungsional
1.	Ermayanti	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d) 01 April 2019	Pengadministrasian kepegawaian	S1 Perikanan / 2001		
2.	Shinta Rahmadina,SE	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d) 01 April 2021	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	S1 Ekonomi Manajemen / 1998		
3.	Miranti Tehupelasuri,SE	Perempuan	Penata (III/c) 01 April 2018	Pengadministrasian Umum	S1 Ekonomi Manajemen / 2002		
4.	Basuni,S.Sos	Perempuan	Penata (III/c) 01 April 2019	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	S1 Ilmu Administrasi Negara		
5.	Isnawati,A.Md	Perempuan	Penata (III/c) 01 April 2021	Verivikator Keuangan	D3 Akuntansi		
6.	Mahrta	Perempuan	Penata Muda Tingkat 1 (III/b) 01 April 2012	Pengelola Data	SMEA / 1987		

7.	Eka Permana	Laki-laki	Penata Muda Tingkat 1 (III/b) 01 April 2012	Pengadministrasian Perizinan	STM Listrik Instalasi / 1992		
8.	Ratna Rory Raihana,SE	Perempuan	Penata Muda Tingkat 1 (III/b) 01 Oktober 2017	Verifikator Keuangan	S1 Ekonomi Akuntansi / 2011		
9.	Annisa Fitri,SE	Perempuan	Penata Muda Tingkat 1 (III/b) 01 Oktober 2017	Pengolah Data dan Pengembangan Investasi	S1 Akuntansi / 2012		
10.	Indah Setiyowati Sutejo,A.Md	Perempuan	Penata Muda Tingkat 1 (III/b) 01 April 2020	Pengadministrasian Keuangan	D3 Akuntansi / 2012		
11.	Didi Iqbaliansyah,S.Sos	Laki-laki	Penata Muda Tingkat 1 (III/b) 01 April 2021	Pengelola Data	S1 Ilmu Administrasi Negara		
12.	Muchamad Rapie,S.AP	Laki-laki	Penata Muda Tingkat 1 (III/b) 01 April 2021	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	S1 Administrasi Publik		
13.	Agus Syaulanor Rahim,A.Md	Laki-laki	Penata Muda (III/a) 01 April 2020	Prana Komputer Pelaksana Lanjutan	D3 Teknik Informatika / 2006		
14.	Akhmad Fazeri	Laki-laki	Pengatur (II/c) 01 April 2019	Pengelola Permodalan dan Investasi	SMU IPS / 2001		

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dapat dikatakan relatif memadai. Dalam rangka menunjang peningkatan kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Banjarbaru, 2021

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Tanah					
1.	Tanah Bangunan Kantor pemerintah		√	-	-	2002
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.101 m ²	√	-	-	2006
II.	Peralatan dan Mesin					
1.	Staion Wagon	1	√	-	-	2014
2.	Staion Wagon	1	√	-	-	2015
3.	Staion Wagon	1	√	-	-	2016
4.	Sepeda Motor Suzuki	1	√	-	-	2006
5.	Sepeda Motor kawasaki	1	√	-	-	2008
6.	Sepeda Motor Honda	1	√	-	-	2013
7.	Sepeda Motor Honda	1	√	-	-	2013
8.	Sepeda Motor Honda	1	√	-	-	2014
9.	Sepeda Motor Honda	1	√	-	-	2014
10.	Sepeda Motor Honda	1	√	-	-	2015
11.	Sepeda Motor Honda	1	√	-	-	2015
12.	Baterai Chargerl	2	√	-	-	2020
13.	Bak Air	1	√	-	-	2020
14.	Bor	1	√	-	√	2020
15.	Cermin Besar (200x75 cm)	1	-	-	√	2004
16.	Global Positioning System (GPS)	2	√	-	-	2016
17.	Scanner	1	√	-	-	2013
18.	Scanner	3	√	-	-	2016
19.	Scanner	1	√	-	-	2019
20.	Air Conditioning Unit	6	√	-	-	2019
21.	Air Conditioning Unit	1	√	-	-	2019
22.	Alat Ukur Lainnya (lain-lain)	1	√	-	-	2016
23.	Alat Ukur Lainnya (lain-lain)	1	√	-	-	2017
24.	Mesin Ketik Manual Portable	1	-	-	√	2013
25.	Mesin Hitung Listrik	1	√	-	-	2013
26.	Mesin Absen (Time Recorder)	1	√	-	-	2018
27.	Lemari Besi	2	-	√ (1)	√ (1)	2004
28.	Lemari Besi	3	-	√ (2)	√ (1)	2004

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
29.	Lemari Besi	1	√	-	-	2007
30.	Lemari Besi	1	√	-	-	2007
31.	Lemari Besi	6	√	-	-	2014
32.	Lemari Besi	2	√	-	-	2015
33.	Lemari Besi	2	√	-	-	2019
34.	Lemari Besi	4	√	-	-	2019
35.	Lemari Besi	15	√	-	-	2019
36.	Lemari Besi	1	√	-	-	2019
37.	Rak Besi	4	√	-	-	2007
38.	Rak Besi	1	√	-	-	2020
39.	Rak Kayu	2	√	-	-	2015
40.	Filling Besi	1	√	-	-	2004
41.	Filling Besi	6	√ (3)	√ (3)	-	2004
42.	Filling Besi	1	√	-	-	2004
43.	Filling Besi	3	√	-	-	2007
44.	Filling Besi	2	√	-	-	2008
45.	Filling Besi	1	√	-	-	2009
46.	Filling Besi	1	√	-	-	2009
47.	Filling Besi	3	√	-	-	2019
48.	Filling Besi	10	√	-	-	2019
49.	Brand Kas	1	√	-	-	2007
50.	Lemari Kaca	1	√	-	-	2006
51.	Rak Kaca	1	√	-	-	2019
52.	Papan Visull	1	√	-	-	2013
53.	Papan Visull	1	-	-	√	2014
54.	Papan Visull	1	-	-	√	2014
55.	Pekakas Kantor	1	√	-	-	2004
56.	Papan Nama Instansi	1	√	-	-	2020
57.	Mesin Absensi	1	-	√	-	2016
58.	Mesin Absensi	1	√	-	-	2019
59.	Genset	1	-	-	√	2015
60.	Genset	2	√	-	-	2019
61.	Genset	1	√	-	-	2020
62.	Mesin Pompa Air	2	√	-	-	2019
63.	LCD Proyektor	1	√	-	-	2006
64.	LCD proyektor	1	√	-	-	2019
65.	Lemari Kayu	2	√	-	-	2005
66.	Lemari Kayu	2	√	-	-	2008
67.	Meja Kayu/Rotan	8	√	-	-	2004
68.	Meja Kayu/Rotan	2	-	√	-	2005
69.	Meja Kayu/Rotan	1	√	-	-	2006
70.	Kursi Besi/Metal	1	√	-	-	2006
71.	Kursi Besi/Metal	1	√	-	-	2008
72.	Kursi Besi/Metal	2	√	-	-	2015

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
73	Kursi Besi/Metal	70	√	-	-	2020
74	Meja Rapat	10	√	-	-	2013
75	Meja Reseption	1	√	-	-	2014
76	Meja Panjang	1	√	-	-	2005
77	Meja Panjang	1	√	-	-	2006
78	Kursi Rapat	20	√ (10	√ (10		2004
79	Kursi Rapat	14	√	-	-	2013
80	Kursi Tamu	1	-	√	-	2004
81	Kursi Tamu	2	√	-	-	2015
82	Kursi Tamu	12	√	-	-	2019
83	Kursi Tangan	1	√	-	-	2019
84	Kursi Putar	4	√	-	-	2012
85	Kursi Biasa	1	√	-	-	2006
86	Kursi Lipat	19	√ (6	√ (13	-	2010
87	Kursi Lipat	2	√	-	-	2013
88	Kursi Lipat	31	√	-	-	2013
89	Kursi Lipat	17	√		√	2014
90	Meja komputer	1	-	√	-	2005
91	Meja komputer	2	-	√	-	2006
92	Meja Komputer	1		√		2006
93	Meja komputer	1	√	-	-	2015
93	Meja Biro	2	√	-	-	2004
94	Meja Biro	2	√	-	-	2005
95	Meja Biro	3	√	-	-	2005
96	Meja Biro	1	√	-	-	2006
97	Sofa	2	√	-	-	2020
98	Kursi Kerja	4	√	-	-	2015
99	Gordyn	38	√	-	-	2012
100	Gordyn	1	√	-	-	2012
101	Gordyn	21	√	-	-	2013
102	Gordyn	1	√	-	-	2013
103	Gordyn	1	√	-	-	2013
104	Gordyn	1	√	-	-	2019
105	Gordyn	60	√			2020
106	Gordyn	60	√			2020
107	Karpet	1	√			2020
108	Karpet	1	√			2020
109	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	√	-	-	2008
110	Mesin Potong Rumput	1	√	-	-	2019
111	Tempat Sampah	2	√	-	-	2020
112	Lemari Es	1	-	-	√	2012

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
113	Lemari Es	1	√	-	-	2014
114	Lemari Es	1	√	-	-	2019
115	Lemari Es	1	√	-	-	2019
116	Lemari Es	2	√	-	-	2020
117	AC Unit	1	√	-	-	2004
118	AC Unit	1	√	-	-	2004
119	AC Unit	1	√	-	-	2007
120	AC Unit	1	√	-	-	2013
121	AC Unit	1	√	-	-	2013
122	AC Unit	2	√	-	-	2014
123	AC Unit	2	√	-	-	2014
124	AC Unit	2	√	-	-	2016
125	AC Unit	3	√	-	-	2016
126	AC Unit	2	√	-	-	2019
127	AC Unit	3	√	-	-	2019
128	AC Unit	2	√	-	-	2020
129	AC Unit	2	√	-	-	2020
130	AC Unit	5	√	-	-	2020
131	AC Unit	5	√	-	-	2020
132	AC Split	8	√	-	-	2020
133	Kompor Gas	1	√	-	-	2019
134	Dispenser	2	√	-	--	2019
135	Rak Piring	1	√	-	-	2019
136	Televisi	1	√	-	-	2012
137	Televisi	3	√	-	-	2014
138	Televisi	4	√	-	-	2019
139	Televisi	1	√	-	-	2019
140	Televisi	2	√	-	-	2020
141	Televisi	3	√	-	-	2020
142	Wireless	1	√	-	-	2019
143	Wireless	1	√	-	-	2019
144	Microphone	1	√	-	-	2019
145	Microphone	1	√	-	-	2019
146	Camera Video	2	√	-	-	2014
147	Camera Video	1	-	-	√	2014
148	Camera Video	2	√	-	-	2019
149	Aquarium	1	√	-	-	2019
150	Aquarium	1	√	-	-	2020
151	Dispenser	1	√	-	-	2008
152	Handy Cam	1	√	-	-	2014
153	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	√	-	-	2019
154	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	√	-	-	2019
155	Tandon Air	3	√	-	-	2019
156	Menara Air	2	√	-	-	2019
157	Tangga	2	√	-	-	2019
158	Selang Penyemprot Air	1	√	-	-	2019

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
159	Internet	1	√	-	-	2012
160	P.C Unit/ Komputer P	2	√	-	-	2013
161	P.C Unit/ Komputer PC	3	√	-	-	2013
162	P.C Unit/ Komputer PC	3	√	-	-	2014
163	P.C Unit/ Komputer PC	2	√	-	-	2016
164	P.C Unit/ Komputer PC	8	√	-	-	2016
165	P.C Unit/ Komputer PC	6	√	-	-	2017
166	P.C Unit/ Komputer P	2	√	-	-	2018
167	P.C Unit/ Komputer PC	3	√	-	-	2018
168	P.C Unit/ Komputer PC	7	√	-	-	2019
169	P.C Unit/ Komputer PC	8	√	-	-	2019
170	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2019
171	P.C Unit/ Komputer P	16	√	-	-	2020
172	P.C Unit/ Komputer PC	1	√	-	-	2020
173	Lap Top	1	√	-	√	2008
174	Lap Top	2	√	-	-	2012
175	Lap Top	1	√	-	-	2012
176	Lap Top	1	√	-	-	2015
177	Lap Top	1	√	-	-	2016
178	Lap Top	2	√	-	-	2017
179	Lap Top	2	√	-	-	2017
180	Lap Top	1	√	-	-	2018
181	Lap Top	1	√	-	-	2018
182	Lap Top	4	√	-	-	2019
183	Lap Top	2	√	-	-	2020
184	Lap Top	5	√	-	-	2020
185	Lap Top	1	√	-	-	2020
186	Note Book	1	√	-	-	2013
187	Note Book	1	√	-	-	2013
188	Note Book	2	√	-	-	2014
189	Note Book	1	√	-	-	2014
190	Hardisk	4	√	-	-	2019
191	Hardisk	1	√	-	-	2020
192	Printer	1	√	-	-	2010
193	Printer	2	-	-	√	2013
194	Printer	1	√	-	-	2013
195	Printer	1	√	-	-	2013
196	Printer	2	√	-	-	2014
197	Printer	1	-	-	√	2014
198	Printer	2	√	-	-	2016
199	Printer	3	√	-	-	2016
200	Printer	5	√	-	-	2016
201	Printer	5	√	-	-	2016
202	Printer	1	-	√	-	2016
203	Printer	1	-	√	-	2016
204	Printer	1	√	-	-	2016
205	Printer	4	√	-	-	2017

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
206	Printer	1	-	-	√	2017
207	Printer	1	√	-	-	2017
208	Printer	1	-	-	√	2017
209	Printer	2	√	-	-	2018
210	Printer	2	√	-	-	2018
211	Printer	2	√	-	-	2018
212	Printer	3	√	-	-	2018
213	Printer	1	√	-	-	2018
214	Printer	13	√	-	-	2019
215	Printer	1	√	-	-	2019
216	Printer	16	√	-	-	2020
217	Flashdisk	10	√	-	-	2019
218	Printer	2	√	-	-	2019
219	Printer	6	√	-	-	2019
220	Printer	1	√	-	-	2019
221	Scanner	1	√	-	-	2019
222	UPS	1	-	√	-	2010
223	UPS	2	√	-	-	2016
224	UPS	1	√	-	-	2016
225	UPS	1	√	-	-	2018
226	UPS	1	√	-	-	2019
227	UPS	8	√	-	-	2020
228	Stabilizer/Stavolt	8	√	-	-	2020
229	Harddisk Eksternal	1	√	-	-	2013
230	Harddisk Eksternal	1	-	√	-	2013
231	Harddisk Eksternal	1	√	-	-	2016
232	Mouse	9	√	-	-	2019
233	Server	1	√	-	-	2013
234	Server	1	√	-	-	2018
235	Server	2	√	-	-	2020
236	Server	1	√	-	-	2020
237	Router	1	√	-	-	2016
238	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	√	-	-	2013
239	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	√	-	-	2004
240	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	√	-	-	2013
241	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	√	-	-	2015
242	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	√	-	-	2010
243	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	√	-	-	2014
244	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	√	-	-	2019
245	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	√	-	-	2019
246	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	√	-	-	2019
247	Meja Kerja	1	√	-	-	2012
248	Meja Kerja	2	√	-	-	2012
249	Meja Kerja	10	√	-	-	2014
250	Meja Kerja	3	√	-	-	2015
251	Meja Kerja	1	√	-	-	2019
252	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1	√	-	-	2019

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
253	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1	√	-	-	2020
254	Kursi Kerja Pejabat Ese	1	√	-	-	2004
255	Kursi Kerja Pejabat Eselon	1	√	-	-	2012
256	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	√	-	-	2013
257	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	√	-	-	2014
258	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	√	-	-	2019
259	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	√	-	-	2014
260	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	√	-	-	2015
261	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	√	-	-	2019
262	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	√	-	-	2019
263	Kursi Rapat Pejabat Lain-Lain	4	√	-	-	2019
264	Kursi Rapat Pejabat Lain-Lain	1	√	-	-	2020
265	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	√	-	-	2013
266	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2	√	-	-	2019
267	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1	√	-	-	2019
268	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	6	√	-	-	2019
269	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	84	√	-	-	2019
270	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	√	-	-	2005
271	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	√	-	-	2007
272	Peralatan Studio Visual Lain-lain	1	√	-	-	2020
273	Layar Proyektor	1	√	-	-	2019
274	Mesin Barcode	1	√	-	-	2015
275	Sound System	1	√	-	-	2019
276	Facsmile	1	√	-	-	2016
277	Facsmile	1	√	-	-	2019
278	Handphone	1	√	-	-	2020
279	Handphone	1	√	-	-	2020
280	Termometer Merkuri Untuk suhu Tubuh	2	√	-	-	2020
281	Tiang Keseimbangan	2	√	-	-	2019
282	TV Monitor	5	√	-	-	2020
283	Alat Ukur	2	√	-	-	2015
284	Pot Besar	20	√	-	-	2020
285	Alat kesehatan Kerja Lain-Lain	1	√	-	-	2020
286	Tripod	1	√	-	-	2019
287	CCTV	1	√	-	-	2014
288	CCTV	1	√	-	-	2016
289	CCTV	8	√	-	-	2019
290	CCTV	8	√	-	-	2019
291	CCTV	2	√	-	-	2020

No.	Kelompok Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Tahun Pengadaan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
III	Gedung dan Bangunan					
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	2006
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	2010
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	2012
4.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	2018
5.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	2019
6.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	2019
7.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	2019
8.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	2019
9.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	2020
10.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	2020
11.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	2020
12.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	√	-	-	2020
13.	Bangunan Pagar	1	√	-	-	2010
14.	Bangunan Pagar	1	√	-	-	2012
15.	Bangunan Tempat Parkir	1	√	-	-	2009
16.	Bangunan Tempat Parkir	1	√	-	-	2012
17.	Bangunan Tempat Parkir	1	√	-	--	2020
18.	Teralis	1	√	-	-	2014
19.	Bangunan Taman	1	-	√	-	2013
20.	Bangunan Taman	1	√	-	-	2014
21.	Bangunan Taman	1	√	-	-	2019
22.	Bangunan Taman	1	√	-	-	2020
23.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	√	-	-	2018
24.	Bangunan Gedung Instalasi Lain-Lain	1	√	-	-	2020
IV.	Jalan, Irigasi dan Jaringan					
1.	Jaringan Air Bersih Rumah Tangga	1	√	-	-	2020
2.	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVAa	1	√	-	-	2016
3.	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVAa	1	√	-	-	2016
4.	Jaringan Transmisi Lain-Lain	1	√	-	-	2019
5.	Jaringan Transmisi Lain-Lain	1	√	-	-	2020
6.	Jaringan Transmisi Lain-Lain	1	√	-	-	2020
7.	Jaringan Listrik	1	√	-	-	2018
8.	Jaringan Listrik	1	√	-	-	2020
V.	Aset Tetap Lainnya					
1.	Buku Laporan Penyelidikan	1	√	-	-	2019
2.	Buku Laporan Lain-Lain	1	√	-	-	2019
3.	Buku Laporan Lain-Lain	1	√	-	-	2019
4.	Buku Laporan Lain-Lain	1	√	-	-	2019
5.	Buku Laporan Lain-Lain	1	√	-	-	2019
6.	Buku Laporan Lain-Lain	1	√	-	-	2019
7.	Buku Laporan Lain-Lain	1	√	-	-	2019
8.	Tanaman Bunga	4	√	-	-	2020

Tabel. 2.3

Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021

No.	Uraian	Merek	Satuan	Kuantitas	Ket
1	2	3	4	5	6
I.	Kendaraan Dinas				
1.	Kendaraan roda empat	Nissan / Evalia	Unit	1	Baik
		Toyota/ New Avansa	Unit	2	Baik
		Toyota Hilux Single Cabin	Unit	1	Baik
2.	Kendaraan roda dua	SUZUKI / Smash	Unit	1	Baik
		Kawasaki/Kaze	Unit	1	Baik
		Honda/NF125 TDS	Unit	2	Baik
		Honda/NF12AICF	Unit	2	Baik
		Honda/SUPRA X	Unit	1	Baik
		Honda X/125 F1	Unit	1	Baik
II.	Inventaris Kantor				
1.	Batteray Charger	-	Buah	2	Baik
2.	Bak Air	-	Buah	1	Baik
3.	Bor	-	Buah	1	Baik
4.	Cermin Besar (200 x 75cm)	-	Buah	1	Baik
5.	Global Positioning System (GPS)	-	Buah	2	Baik
6.	Scanner	ADF	Buah	6	Baik
7.	Air Conditioning Unit	2 PK	Buah	7	Baik
8.	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)		Buah	2	Baik
9.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Brother	Buah	1	Baik
10.	Mesin Hitung Listrik	PRIME DYNAMIC / 995	Buah	1	Baik
11.	Mesin Absen (Time Recorder)	Solution / X601	Buah	1	Baik
12.	Lemari Besi	BROTHER / -	Buah	37	Baik
13.	Rak Besi/Metal	BROTHER / -	Buah	4	Kurang Baik
14.	Rak Besi/Metal	BROTHER / -	Buah	1	Baik
15.	Rak Kayu	BROTHER / -	Buah	2	Baik
16.	Filling Besi/Metal	BROTHER /	Buah	28	Baik
17.	Brand Kas	NASIONAL / -	Buah	1	Baik
18.	Lemari Kaca	MIO / -	Buah	1	Baik
19.	Rak Kaca	MIO / -	Buah	1	Baik
20.	Papan Visuil	LED RUNNING TEXT P16 2 RG	Buah	2	Rusak Berat

No.	Uraian	Merek	Satuan	Kuantitas	Ket
1	2	3	4	5	6
21.	Papan Visuil	- / LED RUNNING TEXT P16 2 RG	Buah	1	Baik
22.	Perkakas Kantor	AKARI / -	Buah	1	Baik
23.	Papan Nama Instansi	AKARI / -	Buah	1	Baik
24.	Mesin Absensi	Solution / X601	Buah	2	Baik
25.	Genset	Solution / X601	Buah	4	Baik
26.	Mesin Pompa Air		Buah	2	Baik
27.	LCD Proyektor		Buah	2	Baik
28.	Lemari Kayu	MELODY / -	Buah	4	Baik
29.	Meja Kayu/Rotan	ACTIVE / -	Buah	10	Baik
30.	Meja Kayu/Rotan	ACTIVE / -	Buah	1	Rusak
31.	Kursi Besi/Metal	IDACHI / -	Buah	74	Baik
32.	Meja Rapat	ACTIVE / -	Buah	10	Baik
33.	Meja Reseption	ACTIVE / -	Buah	1	Baik
34.	Meja Panjang	ACTIVE / -	Buah	2	Baik
35.	Kursi Rapat	NAPOLY / -	Buah	34	Baik
36.	Kursi Tamu	Romeo Furniture	Buah	15	Baik
37.	Kursi Tangan	Romeo Furniture	Buah	1	Baik
38.	Kursi Putar	TIGER / -	Buah	4	Baik
39.	Kursi Biasa	TIGER / -	Buah	1	Baik
40.	Kursi Lipat	CHITOSE / -	Buah	69	Baik
41.	Meja Komputer	DESIGN / -	Buah	4	Kurang Baik
42.	Meja Komputer	Budget / MK 021, W800, D400, H730	Buah	1	Baik
43.	Meja Biro	ACTIVE / -	Buah	8	Baik
44.	Sofa	-	Buah	2	Baik
45.	Kursi kerja	Chitose/Kursi Lipat	Buah	4	Baik

No.	Uraian	Merek	Satuan	Kuantitas	Ket
1	2	3	4	5	6
46.	Gordyn	VERT&HORIZONTAL / VERTIKAL HORIZONTAL	Buah	184	Baik
47.	Karpet		Buah	3	Baik
48.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner		Buah	1	Baik
49.	Mesin Potong Rumput		Buah	1	Baik
50.	Tempat Sampah		Buah	2	Baik
51.	Lemari ES	TOSHIBA / -	Buah	1	Rusak
52..	Lemari ES	TOSHIBA / -	Buah	5	Baik
53.	AC Unit	LG / -	Buah	41	Baik
54.	Kompas Gas	-	Buah	1	Baik
55.	Dispenser	-	Buah	2	Baik
56.	Rak Piring		Buah	1	Baik
57.	Televisi	SHARP / -	Buah	14	Baik
58.	Wireless	DAT 1511	Buah	2	Baik
59.	Microphone	-	Buah	2	Baik
60.	Camera Video	NIKON COOLPIX S 3500	Buah	4	Baik
61.	Camera Video		Buah	1	Rusak Berat
62.	Aquarium		Buah	2	Baik
63.	Dispenser		Buah	1	Baik
64.	Handy Cam		Buah	1	Baik
65.	Alat Rumah Tangga Lain-lain		Buah	3	Baik
66.	Tandon Air		Buah	3	Baik
67.	Menara Air		Buah	2	Baik
68.	Tangga		Buah	2	Baik
69.	Selang Penyempnot Air		Buah	1	Baik
70.	Internet		Buah	1	Baik
71.	P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo	Buah	62	Baik
72.	Lap Top	TOSHIBA / -	Buah	1	Rusak Berat
73.	Lap Top	TOSHIBA / -	Buah	23	Baik
74.	Note Book	TOSHIBA / -	Buah	5	Baik

No.	Uraian	Merek	Satuan	Kuantitas	Ket
1	2	3	4	5	6
75.	Hard Disk		Buah	5	Baik
76.	Printer	CANON IP2770 /	Buah	5	Rusak Berat
77.	Printer	Canon / IP 2770	Buah	2	Rusak
78.	Printer	CANON / PIXMA E 400	Buah	75	Baik
79.	Flashdisk		Buah	10	Baik
80.	Scanner		Buah	1	Baik
81.	UPS	ICA / CE 1200VA	Buah	1	Rusak
82.	UPS	ICA / CE 1200VA	Buah	13	Baik
83.	Stabilizer/Stavolt		Buah	8	Baik
84.	Harddisk Eksternal	ITB, SATA	Buah	1	Rusak
85.	Harddisk Eksternal	ITB, SATA	Buah	2	Baik
86.	Mouse		Buah	9	Baik
87.	Server		Buah	5	Baik
88.	Router		Buah	1	Baik
89.	Peralatan Jaringan Lain-lain		Buah	1	Baik
90.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Shaga / OD260	Buah	3	Baik
91.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	OT-121 / W 120XD60XH75	Buah	10	Baik
92.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Chitose	Buah	11	Baik
93.	Meja Kerja	PRO DESIGN / -	Buah	17	Baik
94.	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	Shaga / OD220	Buah	2	Baik
95.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	AVANSA / -	Buah	1	Baik
96.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	AVANSA / -	Buah	10	Baik

No.	Uraian	Merek	Satuan	Kuantitas	Ket
1	2	3	4	5	6
97.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Indaichi / D790 N0. 41	Buah	15	Baik
98.	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	OT-121 / W 120XD60XH75	Buah	5	Baik
99.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	ROMAWI KEMBANG / -	Buah	1	Baik
100.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	ROMAWI KEMBANG / -	Buah	2	Baik
101.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	ROMAWI KEMBANG/-	Buah	91	Baik
102.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	BROTHER / -	Buah	2	Baik
103	Peralatan studio Visual Lain-lain		Buah	1	Baik
104	Layar Proyektor		Buah	1	Baik
105	Mesin Barcode		Buah	1	Baik
106	Sound System		Buah	1	Baik
107	Facsimile	PANASONIC / KX- FT983	Buah	2	Baik
108	Handphone	Samsung A51	Buah	2	Baik
109	Termometer Merkuri untuk Suhu Badan		Buah	2	Baik
110	Tiang Keseimbangan		Buah	2	Baik
111	TV Monitor	Samsung	Buah	5	Baik
112	Alat Ukur	Bison / Gulung	Buah	2	Baik
113	Pot Besar		Buah	20	Baik
114	ALat Kesehatan Kerja Lain-lain		Buah	1	Baik
115	Tripod		Buah	1	Baik
116	CCTV	HICOM-	Buah	20	Baik
117	Bangunan Gedung Kantor Permanen		unit	12	Baik
118	Bangunan Pagar			2	Baik
119	Bangunan Tempat Parkir			3	Baik
120	Teralis			1	Baik

No.	Uraian	Merek	Satuan	Kuantitas	Ket
1	2	3	4	5	6
121	Bangunan Taman			1	Kurang Baik
122	Bangunan Taman			3	Baik
123	Bangunan Gudang Tertutup Permanen			1	Baik
124	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain			1	Baik
125	Jaringan Air Bersih Rumah Tangga			1	Baik
126	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA			1	Baik
127	Jaringan Transmisi Lain-lain		Paket	3	Baik
128	Jaringan Listrik		Paket	1	Baik
129	Buku Laporan Lain-lain		Buah	4	Baik

2.3. PENCAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis pada periode Renstra sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dapat diketahui guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Target yang ditetapkan pada Rencana Strategis periode sebelumnya belum mengacu terhadap indikator kinerja daerah. Mendasarkan pada pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada kurun waktu tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan sasaran target dan indikator kinerja berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Nilai investasi daerah pertahun, tercapai sesuai dengan target pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.453,6 Milyar atau dengan capaian sebesar 154%.

2. Nilai investasi daerah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 terjadi penurunan yang sangat besar dimana realisasi pada tahun 2020 hanya sebesar Rp. 119,5 Miliar dengan target sebesar Rp. 450 Miliar atau dengan capaian sebesar 26,5%.
3. Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) capaiannya cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2020 tidak ada realisasi investasi PMA sehingga capaian tahun 2020 adalah 0%.
4. Nilai IKM terhadap pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal cenderung mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar 87,5 dari target sebesar 81,1 atau dengan capaian sebesar 107,3% hal ini dipengaruhi karena adanya masa pandemi Covid-19 banyak perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan sistem *online* sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru meningkat.
5. Nilai Skor Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsman untuk capaian realisasi tahun 2019 dan 2020 tidak ada karena Pemerintah Kota Banjarbaru sudah masuk zona hijau pada tahun 2018 dengan nilai 92,09 yang mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru mendapatkan nilai skor sebesar 98,875 yang juga masuk zona hijau.

Rincian mengenai pencapaian kinerja Dinas Tahun 2016-2020 ditampilkan pada Tabel 2.4. Dari sisi anggaran selama periode 2016-2021, realisasi capaian kinerja anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikatakan mengalami perbaikan walaupun penyerapannya belum mencapai 100% dalam kurun waktu tersebut. Rincian mengenai pencapaian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2016-2020 ditampilkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun 2016-2020					Realisasi Capaian Tahun 2016-2020					Rasio Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indikator Nilai Investasi Daerah Pertahun	Milyar Rp	N/A	N/A	1.556,6	1.983,6	2.453,6	N/A	N/A	1.630,45	3.666,8	3.786	N/A	N/A	104,74	184,8	154
2.	Indikator Nilai Investasi Daerah PMDN	Milyar Rp	370	360	380	410	450	410	289,8	516,55	2.002,3	119,5	110,81	80,5	135,9	493	26,5
3.	Indikator Nilai Investasi Daerah PMA	Milyar Rp	14	15	14	17	20	10,6	10,005	23,5	14	0	75,71	66,7	167,8	82	0
4.	Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	81,32	81,33	80,5	81	81,1	81,34	81,326	84,85	86,41	87,50	100,02	99,9	105,4	106,6	107,3
5.	Indikator Nilai Skor Kepatuhan Standar Pelayanan Versi Ombudsman	Angka	N/A	N/A	98	98	98,5	N/A	N/A	98,875	98,875	98,875	N/A	N/A	100,9	100,9	100,9

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA	5.126.270.843	5.488.245.38	5.867.661.133	9.264.076.680	16.494.616.081	4.736.684.558	5.167.387.382	5.564.198.263	8.739.950.527	16.124.712.591	2.224	-	-	-	-	-	-
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.994.793.843	3.515.794.000	3.898.209.950	4.043.386.480	3.587.204.680	2.767.315.756	3.321.901.025	3.718.711.906	3.685.600.014	3.463.094.343	92	94	95	91	97	-	-
Belanja Pegawai	2.994.793.843	3.515.794.000	3.898.209.950	4.043.386.480	3.587.204.680	2.767.315.756	3.321.901.025	3.718.711.906	3.685.600.014	3.463.094.343	92	94	95	91	97	-	-
BELANJA LANGSUNG	2.131.477.000	1.972.451.538	1.969.451.183	5.220.690.200	12.907.411.401	1.969.368.802	1.845.486.357	1.845.486.357	5.054.350.513	12.661.618.248	2.132	-	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	506.283.900	673.562.033	670.562.033	1.242.171.100	1.193.565.451	493.727.023	660.991.030	660.991.030	1.152.669.536	1.075.728.263	98	98	99	93	90	4.481	4.363
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.370.000	2.370.000	2.370.000	0	0	95	95	95	-	-	-100	-100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber air dan Listrik	77.496.000	69.885.600	69.885.600	107.399.200	236.250.000	65.072.723	61.844.860	61.844.860	70.720.650	148.403.511	84	88	88	66	63	205	128
Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	3.148.900	36.150.000	36.150.000	47.960.000	120.501.250	3.145.300	35.650.000	35.650.000	47.105.500	119.696.250	100	99	99	98	99	3.727	3.706
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14.400.000	16.800.000	16.800.000	22.400.000	35.700.000	14.400.000	16.800.000	16.800.000	22.400.000	35.700.000	100	100	100	100	100	148	148
Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.500.000	24.499.800	21.499.800	53.927.900	82.602.000	21.500.000	21.498.550	21.498.550	45.601.400	82.195.000	100	88	100	85	100	284	282
Penyediaan barang Cetakan & Penggandaan	36.750.000	38.500.000	38.500.000	33.550.000	29.172.500	36.750.000	38.500.000	38.500.000	30.550.750	29.172.500	100	100	100	91	100	-21	-21



RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021-2026

Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	3.600.000	3.600.000	3.600.000	5.356.000	3.740.000	3.600.000	3.120.000	3.120.000	5.020.000	3.740.000	100	87	87	94	100	4	4
Penyediaan Makanan dan Minuman	37.946.000	67.770.000	67.770.000	121.938.000	52.490.000	37.946.000	67.760.000	67.760.000	117.056.000	52.430.000	100	100	100	96	100	38	38
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	145.143.000	250.056.633	250.056.633	496.000.000	114.529.701	145.143.000	249.647.620	249.647.620	464.045.236	105.749.402	100	100	100	94	92	-21	-27
Penyediaan Jasa Non PNS	163.800.000	163.800.000	163.800.000	353.640.000	518.580.000	163.800.000	163.800.000	163.800.000	350.170.000	498.641.600	100	100	100	99	96	217	204
Program peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	249.650.000	271.760.000	271.760.000	2.856.485.500	10.407.270.000	215.762.400	268.665.243	268.665.243	2.808.234.650	10.334.871.401	86	99	99	98	99	4.069	4.690
Pembangunan Gedung Kantor	0	0	0	230.867.500	7.520.100.000	0	0	0	228.484.500	7.495.148.600	-	-	-	99	100	-	-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	25.000.000	25.000.000	617.060.000	127.670.000	0	24.800.000	24.800.000	602.610.500	124.205.000	-	99	99	98	97	-	-
Pengadaan peralatan gedung kantor	134.300.000	84.760.000	84.760.000	495.260.000	990.520.000	119.300.000	83.475.000	83.475.000	490.945.000	980.320.000	89	98	98	99	99	638	722
Pengadaan Mebeleur	0	0	0	158.420.000	294.040.000	0	0	0	155.660.000	277.430.000	-	-	-	98	94	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	0	0	0	0	360.520.000	0	0	0	0	358.728.000	-	-	-	-	100	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	38.150.000	80.000.000	80.000.000	37.500.000	45.000.000	36.563.000	79.815.743	79.815.743	32.419.800	40.304.800	96	100	100	86	90	18	10
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional	37.200.000	42.000.000	42.000.000	97.058.000	107.550.000	34.009.400	40.574.500	40.574.500	93.794.200	102.105.000	91	97	97	97	95	189	200
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	40.000.000	40.000.000	40.000.000	38.600.000	92.350.000	25.890.000	40.000.000	40.000.000	30.900.000	90.750.001	65	100	100	80	98	131	251
Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	0	0	0	8.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	-	-	-	88	-	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	0	0	0	1.173.220.000	869.520.000	0	0	0	1.165.920.650	865.880.000	-	-	-	99	100	-	-



Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	35.000.000	35.000.000	103.800.000	86.460.000	0	34.700.000	34.700.000	102.050.000	84.300.000	-	99	99	98	98	-	-
Pengadaan Pakaian Khusus Petugas pelayanan	0	35.000.000	35.000.000	103.800.000	86.460.000	0	34.700.000	34.700.000	102.050.000	84.300.000	-	99	99	98	98	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	52.000.000	0	0	0	0	45.640.000	0	-	-	-	88	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	0	0	0	52.000.000	0	0	0	0	45.640.000	0	-	-	-	88	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.068.150	89.642.000	89.642.000	70.037.650	65.529.450	23.785.050	88.932.000	88.932.000	69.197.650	64.001.750	198	196	196	194	193	-	-
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	0	41.099.000	41.099.000	28.637.850	34.759.000	0	41.099.000	41.099.000	28.637.850	34.423.000	-	100	100	100	99	-	-100
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	19.493.650	29.118.000	29.118.000	27.899.800	14.085.500	19.216.600	29.118.000	29.118.000	27.899.800	14.085.000	99	100	100	100	100	-28	-34
Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	4.574.500	19.425.000	19.425.000	13.500.000	16.684.950	4.568.450	18.715.000	18.715.000	12.660.000	15.493.750	100	96	96	94	93	265	-76
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	342.453.900	246.958.155	246.958.200	219.218.000	279.775.000	291.385.049	246.925.200	246.925.200	218.524.500	267.975.000	438	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	47.186.000	0	0	0	0	31.422.000	0	0	0	0	67	-	-	-	-	-100	-
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	24.900.000	25.000.000	25.000.000	0	0	100	100	100	-	-	-100	0
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	39.999.900	9.608.905	9.608.950	0	0	25.881.999	9.608.950	9.608.950	0	0	65	100	100	-	-	-100	169



Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	14.618.250	0	0	0	0	8.799.000	0	0	0	0	60	-	-	-	-	-100	-
Penyelenggaraan Pameran Investasi	200.000.000	203.049.250	203.049.250	219.218.000	279.775.000	192.514.800	203.049.250	203.049.250	218.524.500	267.975.000	96	100	100	100	96	40	-5
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.649.750	9.300.000	9.300.000	0	0	7.867.250	9.267.000	9.267.000	0	0	50	100	100	-	-	-100	-15
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	78.914.500	51.259.400	51.259.400	209.207.950	73.645.000	76.176.500	51.259.400	51.259.400	202.496.450	65.213.000	194	200	200	-	-	-	-
Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	28.999.500	21.655.000	21.655.000	161.807.950	20.000.000	28.649.500	21.655.000	21.655.000	160.457.950	20.000.000	99	100	100	99	100	-31	32
Kajian Kebijakan Penanaman Modal	49.915.000	21.114.500	21.114.500	0	0	47.527.000	21.114.500	21.114.500	0	0	95	100	100	-	-	-100	125
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	8.489.900	8.489.900	47.400.000	53.645.000	0	8.489.900	8.489.900	42.038.500	45.213.000	0	100	100	89	84	-	-100
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	930.106.550	639.269.950	639.269.550	623.570.000	887.626.500	868.532.780	528.713.484	528.713.484	603.227.727	853.828.834	1.118	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Perijinan	150.975.000	60.980.000	60.980.000	0	53.000.000	140.099.500	60.180.000	60.180.000	0	53.000.000	93	99	99	-	100	-65	130
Study Magang Aparatur Pelayanan Publik/ Masyarakat	75.000.000	0	0	0	0	59.258.190	0	0	0	0	79	-	-	-	-	-100	-



RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021-2026

Pendataan dan Survey Perijinan	59.891.000	34.972.000	34.972.000	53.213.000	0	52.869.900	34.948.000	34.948.000	53.213.000	0	88	100	100	100	-	-100	51
Penyusunan Tata Laksana Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan	75.000.000	100.912.200	100.912.000	0	0	74.248.000	89.543.934	89.543.934	0	0	99	89	89	-	-	-100	-26
Pendataan dan Survey Non Perijinan	31.385.000	0	0	0	0	30.948.000	0	0	0	0	99	-	-	-	-	-	-
Pendataan dan Survey Perijinan Paralel dan Penanaman Modal	50.545.650	81.639.200	81.639.200	0	0	46.851.050	73.261.200	73.261.200	0	0	93	90	90	-	-	-100	-43
Pembangunan Aplikasi SMS Center	23.000.000	32.706.000	32.706.000	0	0	23.000.000	31.466.000	31.466.000	0	0	100	96	96	-	-	-100	-30
Peningkatan Standarisasi Pelayanan	68.189.900	67.979.550	67.979.500	0	97.500.000	52.989.900	57.279.500	57.279.500	0	96.513.500	78	84	84	-	99	43	-22
Pendataan dan Survey Perijinan Reklame	174.520.000	132.583.000	132.582.900	0	0	173.927.740	60.621.900	60.621.900	0	0	100	46	46	-	-	-100	31
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perijinan Reklame	160.200.000	55.888.000	55.888.000	0	0	154.200.500	50.388.000	50.388.000	0	0	96	90	90	-	-	-100	176
Pembangunan Database Perijinan Reklame	51.000.000	43.300.000	43.300.000	0	0	50.200.000	43.150.000	43.150.000	0	0	98	100	100	-	-	-100	16
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	10.400.000	5.248.000	5.247.950	77.400.000	84.100.000	9.940.000	4.817.950	4.817.950	76.400.000	81.795.000	96	92	92	99	97	709	89
pengolahan data perizinan	0	23.062.000	23.062.000	111.308.000	110.600.000	0	23.057.000	23.057.000	107.302.727	98.870.000	-	100	100	96	89	-	-100



Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan Tertentu	0	0	0	40.900.000	35.560.000	0	0	0	40.665.000	21.362.834	-	-	-	99	60	-	-
Pendataan Perizinan Ketataruangan	0	0	0	43.100.000	31.302.000	0	0	0	32.559.000	27.173.000	-	-	-	76	87	-	-
Pendukung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	0	0	0	297.649.000	475.564.500	0	0	0	293.088.000	475.114.500	-	-	-	98	100	-	-

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru memiliki tantangan dan peluang dalam peningkatan realisasi investasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Banjarbaru. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2021-2026 adalah bagaimana langkah strategis memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan tugas Walikota dan Wakil Walikota dimana selama 5 (lima) tahun ke depan akan banyak agenda pembangunan yang harus diselesaikan. Selanjutnya adalah peningkatan standar pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan pelayanan tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
3. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tantangan kedepan yang harus dihadapi Kota Banjarbaru dalam meningkatkan realisasi investasi sangatlah berat mengingat banyak faktor yang akan mempengaruhi pencapaian realisasi investasi di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarbaru. Salah satu isu

kursial dalam kebijakan investasi adalah perihal kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang terlihat pada sejumlah isu turunan seperti kerangka regulasi, biaya transaksi dan prosedur perizinan, percepatan pemberian izin dan non perizinan dan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan, daya Tarik akan muncul jika Pemerintah Kota Banjarbaru memfasilitasi kemudahan investor untuk memulai/memasuki kegiatan bisnisnya dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha (PPB) di daerah Kota Banjarbaru.

Selain tantangan yang ada, dalam rangka pengembangan peningkatan pelayanan publik, peluang yang ada kedepannya cukup memberikan kesempatan bagi organisasi untuk terus berkembang. Pemanfaatan teknologi maju dalam pelayanan publik adalah salah satu peluang yang mesti direspon oleh Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, karena perubahan zaman yang begitu masif ini menuntut organisasi untuk bergerak cepat, mudah dan transparan dalam memberikan pelayanan. Selain itu, dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana kantor ke depan, maka layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung program Walikota dan Wakil Walikota ke depan akan lebih maksimal.

Tabel 2.6
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tantangan	Peluang
Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berorientasi pada peningkatan daya saing Kota Banjarbaru	Adanya regulasi yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan dan pasti serta peningkatan kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan
Tingginya tingkat instabilitas kebijakan maupun regulasi yang baku, yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman

Tantangan	Peluang
	modal yang cepat, murah, mudah, transparan dan pasti
Belum tersedianya rumusan kebijakan penanaman modal yang mendukung iklim investasi Kota Banjarbaru sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penanaman modal yang diarahkan pada peningkatan daya saing kota	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026
Meningkatkan citra Kota Banjarbaru sebagai kota tujuan penanaman modal yang prospektif dan kondusif dan menjanjikan bagi para investor	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal merupakan salah satu faktor yang akan berpengaruh terhadap pengungkit pembangunan ekonomi daerah
Meningkatkan pengendalian terhadap pelaku usaha guna tertib izin secara administratif	Adanya dukungan kebijakan dan pendanaan dari Pemerintah Pusat
Meningkatkan akuntabilitas kinerja, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia DPMPTSP yang professional	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan pelayanan yang berdampak pada kondusifnya iklim investasi di Kota Banjarbaru	Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal Adanya dorongan dari semua pemangku kepentingan untuk menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Menjadi institusi yang terpercaya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
3. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa fungsi tersebut diatas dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang

dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru

Aspek	Deskripsi
Aspek Organisasi	• Ketidak sesuaian nomenklatur DPMPTSP Kota Banjarbaru yang berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota • Regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat yang sering berubah-ubah sehingga daerah belum sempat melakukan penyesuaian.
Aspek Sarana dan Prasarana	• Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi sudah cukup memadai sehingga akselerasi pelayanan di DPMPTSP sudah berjalan optimal. Permasalahan juga muncul dari segi pemeliharaan sarana dan prasarana

Aspek	Deskripsi
	tersebut karena terbatasnya dana pendukung. • Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang masih terbatas dari segi jumlah dan kualitas seperti ketersediaan kendaraan dinas/operasional, jabatan dan kendaraan lapangan.
Aspek Sumber Daya Manusia	• Apabila dilihat dari kuantitas SDM yang tersedia, maka tidak sebanding dengan beban tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaan. • Sementara itu, terbatasnya kewenangan DPMPTSP dalam hal rekrutmen dan pengembangan ASN menjadi hambatan tersendiri dalam menghadapi keterbatasan ini. • Dilihat dari kualitas SDM yang dimiliki masih kurang. Luas lingkup pekerjaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menuntut tersedianya tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan atau skill khusus. Rendahnya kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh etos dan budaya kerja yang lamban, tidak ramah dan tidak transparan. • Permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi baik dalam internal

Aspek	Deskripsi
	Perangkat Daerah sehingga berpengaruh dalam pencapaian kinerja.
Aspek Pelayanan Publik	Kualitas pelayanan publik menjadi sorotan seiring tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus segera merespon tuntutan tersebut dengan : • Melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan (simplifikasi regulasi) terhadap standar pelayanan yang ada berikut SOP, SDM dan fasilitas pelayanannya. Kondisi yang ada saat ini menunjukkan masih belum terpenuhinya harapan publik akan kualitas pelayanan publik, hal ini dilihat dari standar pelayanan yang masih perlu direvisi dan diimplementasikan, aparatur pelayanan juga belum memberikan pelayanan seperti yang diharapkan, serta fasilitas pelayanan yang masih kurang lengkap. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan adalah masih lemahnya kontrol terhadap implementasi standar pelayanan, sehingga belum terlihat konsistensi dalam memberikan pelayanan yang ramah cepat dan akuntabel.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

“ BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA ”

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :

MAJU : Cerminan komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

AGAMIS : Di maknai bahwa masyarakat masyarakat Kota Banjarbaru yang berahlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti pada tahun 2025.

SEJAHTERA : Sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan pemerintahan yang baik.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin

dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berahlak mulia;
2. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Ditinjau dari segi tugas pokok dan fungsinya selaku penyelenggara pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru secara khusus berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi ke 2 yaitu **Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup**, dan misi ke 3 **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah**.

3.2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah

(OPD) di lingkungan Kota Banjarbaru untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.2
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

Visi : BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia	1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas berlandaskan nilai agama dan budaya	1.1 Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat
		1.2 Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat
		1.3 Meningkatnya kesetaraan gender
		1.4 Terjaganya daya beli masyarakat
		1.5 Meningkatnya keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inklusif yang berkelanjutan	1.1 Meningkatnya kegiatan perekonomian kota
		1.2 Meningkatnya pendapatan asli daerah dan nilai investasi daerah
		1.3 Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
		1.4 Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat
		1.5 Meningkatnya infrastruktur kota yang berkualitas

Misi	Tujuan	Sasaran
		1.6 Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
Misi 3 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang amana	1. Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan bebas KKN	1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan system pengendalian internal pemerintah daerah
		1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		1.3 Meningkatnya kualitas layanan informasi publik pemerintah daerah

Berkaitan dengan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah pada Misi 2 dan misi 3 yaitu:

- 1.1. Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kaerifan Lokal dan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup “. Pada misi 2, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam periode 2021-2026 yaitu “ Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah “. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada tujuan tersebut yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah*.
- 1.2. Sedangkan misi ke 3 yaitu Mewujudkan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah” dengan tujuan Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Bebas KKN dengan sasaran

pembangunan jangka menengah yang menjadi acuan dalam rangka peningkatan kinerja DPMPTSP adalah *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah* serta sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, maka hal tersebut selain berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, juga mengacu Rencana

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Mendasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024 yaitu visi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah “ **BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong “**. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merumuskan dan menetapkan misi yang diemban yaitu (a); Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing (b); Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Dari visi dan misi Badan Koordinasi Penanaman Modal,

selanjutnya ditetapkan tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Dari tujuan yang ditetapkan tersebut, selanjutnya ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam periode 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020--2024

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
I.	Tujuan 1 Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal		
1	Sasaran 1 Meningkatnya realisasi penanaman modal	Arah Kebijakan Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal	Arah Kebijakan 1.1. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (<i>investor needs</i>) 1.2. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing 1.3. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal 1.4. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			1.5. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal 1.6. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal 1.7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
2	Sasaran 2 Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal	Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Arah Kebijakan 2.1. Medorong peningkatan penanaman modal dibidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja 2.2. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal 2.3. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi 2.4. Mendorong daya saing dan akses pasar 2.5. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industry substitusi impor 2.6. Mendukung peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar; dan 2.7. Mendorong peningkatan dan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri

3.3.2. Telaahan Rencana Strategis SKPD Provinsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki visi “ KalSel Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara” dengan misi sebagai berikut Misi 2 yaitu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata, Tujuan 1 adalah Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Investasi yang Berdampak Ke Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri dan Pertanian (Rp.).

Melihat dari tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dapat dilihat keterkaitan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru yang sama-sama memprioritaskan peningkatan investasi daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Struktur Ruang

Isu strategis menurut RTRW 2014-2023. Berdasarkan RTRW, terdapat penetapan Kawasan strategis kota yang dinilai berdasarkan sudut kepentingannya, antara lain kawasan yang memiliki nilai strategis dari :

1. Sudut Kepentingan Ekonomi

- a. PPK I : Kawasan pusat kegiatan Bandar udara internasional di Kecamatan Landasan Ulin
- b. PPK II: Kawasan pusat kegiatan perkantoran pemerintahan di Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Banjarbaru Selatan.

2. Sudut Kepentingan Jaringan Prasarana Wilayah Kota.

Jaringan prasarana wilayah kota Banjarbaru merupakan urat nadi dalam perkembangan kota ke depannya. Oleh karena itu ketersediaan jaringan prasarana wilayah kota mutlak wajib dipenuhi guna pelayanan kepada masyarakat, pengembangan sector sector perekonomian baru maupun peningkatan investasi dan tumbuhnya perekonomian kota.

Jaringan prasarana wilayah kota meliputi :

a. Transportasi Darat

Tersedianya system jaringan jalan baik arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder, kolektor sekunder maupun jalan lingkungan. Selain tersedianya system jaringan jalan yang terkoneksi satu sama lain sehingga membuka akses bagi pelayanan masyarakat maupun tumbuh kembangnya sector ekonomi. Maka perlu pula didukung oleh Sistem Transportasi Jalan yang baik dan memadai. Adapun system transportasi jalan adalah tersedianya terminal angkutan penumpang yang dikategorikan tipe C meliputi terminal Liang Anggang, terminal pasar kamaratih, terminal simpang empat banjarbaru dan terminal pasar bauntung. Sistem Jaringan Angkutan Umum meliputi system koridor utama Banjarmasin Banjarbaru dan Banjarbaru-Martapura. Selain itu akan dikembangkan system sirkulator/pengumpang sebagai pendukung akses bagi system koridor utama. Ada 5 (lima) system sirkulator/pengumpang yang akan dikembangkan sesuai RTRW 2014-2023.

b. Transportasi Udara

Bandar Udara Syamsudin Noor yang direncanakan sebagai bandara Internasional mulai dikembangkan dengan luas kawasan kurang lebih 400 Ha meliputi fungsinya sebagai bandara penumpang dan cargo yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin.

3. Sudut Kepentingan Prasarana Lainnya

Sistem prasarana lainnya meliputi :

- a. Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan dimana terdapat gardu induk di Kecamatan Cempaka.
- b. Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan system jaringan kabel yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi serta pembangunan Base Transceiver Station (BTS).
- c. Pengembangan sumber daya air kota yang meliputi Kecamatan Banjarbaru Utara dan Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Liang Anggang.
- d. Pengembangan Infrastruktur Perkotaan yang meliputi penyediaan air minum kota, pengelolaan air limbah, system persampahan, system drainase kota, prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan jalur evakuasi bencana.

4. Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Sebagai kota yang berkembang pesat, Banjarbaru memerlukan sebuah pusat budaya yang difungsikan sebagai pusat pendidikan dan budaya serta balai pertemuan nasional dan internasional. Selain itu, juga diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sarana pusat budaya yang representative lengkap dengan ruang terbuka hijau. Di Banjarbaru, kawasan tersebut belum tersedia akan tetapi mulai direncanakan bertahap untuk diadakan dan dibangun di Kawasan Masjid Agung.

5. Sudut Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan sungai Kemuning, sungai Bangkal, hutan kota Pinus, hutan lindung di wilayah Liang Anggang dan perbukitan di wilayah Sungai Ulin dan Cempaka merupakan kawasan yang memiliki peran sebagai Ruang Terbuka Hijau, sumber

air baku, dan kawasan resapan air kota. Karena itulah pembangunan di daerah ini perlu dibatasi dan dikendalikan.

Dengan demikian, kawasan Strategis Nasional yang berada di wilayah Kota Banjarbaru adalah Kawasan Hutan Lindung di Liang Anggang. Kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kota Banjarbaru adalah Kawasan Murjani Banjarbaru Utara dan Kawasan sekitar Pusat Pemerintahan di daerah Cempaka. Di samping hal-hal diatas, terdapat pula detil-detil peruntukan ruang pada RTRW Kota Banjarbaru 2014-2023 yang perlu menjadi perhatian BPPT&PM dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan perizinan yang selaras dengan dokumen perencanaan kota. Diperlukan bantuan dan peran serta BPPT&PM dalam mengendalikan izin yang dikeluarkan agar tidak bertentangan dengan rencana pada RTRW ini.

Selain itu, terdapat pula kebijakan perihal pengembangan Rencana Pola Ruang, yang penjelasannya akan digabungkan dengan telaahan kajian Rencana Pola Ruang pada bab selanjutnya.

3.4.2. Telaahan Kajian Rencana Pola Ruang

Isu strategis menurut Rencana Pola Ruang Kota Banjarbaru 2014-2023

Dalam Rencana Pola Ruang Kota Banjarbaru terdapat penjelasan mengenai isu-isu strategis mengenai kebutuhan pembangunan di Kota Banjarbaru di bidang Lingkungan Hidup, khususnya dalam Rencana Pola Ruang, dengan penjelasan berikut :

1. Rencana Kawasan Lindung

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
Merupakan kawasan resapan air di wilayah Liang Anggang. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan

resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada tanah dan pengendalian banjir.

b. Kawasan perlindungan setempat

Meliputi daerah seperti : jalur sempadan sungai, kawasan di bawah saluran udara tegangan tinggi, sempadan jalan, kawasan sekitar danau buatan, dan kawasan sekitar mata air. Dalam kaitannya dalam pembangunan, diperlukan pengembangan dan penataan jalur sempadan sungai Kemuning yaitu dengan panjang 7000 meter dan lebar 5 - 12 meter, penambahan jalur hijau di sejumlah jaringan jalan (Jl. Ahmad Yani, Jl. Trikora, dan Jalan Panglima Batur), , serta intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di kawasan Banjarbaru Utara dan rencana embung di kawasan Guntung Payung.

c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Diperlukan ruang terbuka hijau dengan luas sedikitnya 30% dari luas Wilayah Kota Banjarbaru dengan rincian: 20% RTH Publik dari 10% RTH privat. Untuk itu, pembangunan RTH perlu menjadi suatu syarat dalam mendapatkan izin pembangunan terkait.

d. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya

Kawasan Danau Seran, Hutan Pinus dan kawasan cagar budaya merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik dan pelestarian lingkungan alam yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Banjarbaru. Terdapat sejumlah titik yang peruntukan pembangunannya spesifik untuk keperluan pelestarian ini.

e. Kawasan rawan bencana

Untuk mengendalikan kawasan rawan bencana yang terdapat di sejumlah titik, dibuatlah rencana penanganan kawasan bencana kebakaran, gerakan tanah & longsor, serta genangan & banjir yang meliputi kegiatan relokasi, pengendalian pembangunan, maupun rehabilitasi dan penataan saluran

drainase jalan. Untuk mendukung rencana-rencana ini, dibutuhkan dukungan administrative perizinan agar rencana pembangunan dapat berjalan baik tanpa terganggu isu non-teknis.

f. Rencana Kawasan Peruntukkan lainnya

Kawasan yang dimaksud adalah kawasan pertanian, kawasan pertambangan terbatas dan kawasan pelayanan umum. Pada kawasan ini pembangunan disesuaikan dengan peruntukkan kawasannya.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, diperlukan pengendalian pembangunan untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan pembangunan di daerah-daerah.

2. Rencana Kawasan Budidaya

a. Rencana pengembangan kawasan permukiman

Dengan kecenderungan pembangunan yang intensitasnya meningkat di wilayah dalam kota Banjarbaru, maka perlu adanya penataan kawasan yang meliputi kawasan peruntukkan permukiman kepadatan tinggi di Kecamatan Landasan Ulin, kepadatan sedang di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan serta kepadatan rendah di Kecamatan Liang Anggang dan Cempaka.

b. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

Terdapat rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas pasar tradisional (Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Cempaka), pusat perbelanjaan dan toko modern (Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan).

c. Rencana pengembangan kawasan perkantoran

Perkantoran yang dimaksud adalah perkantoran pemerintahan, yang terdiri dari kegiatan pemerintahan berskala nasional, regional, dan kota.

Rencana pengembangan kawasan perkantoran Kota Banjarbaru dilaksanakan dengan mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi, dan kota pada lokasi yang sudah berkembang serta mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di 5 (lima) Kecamatan dan Kawasan peruntukkan perkantoran non Pemerintahan di 5 (lima) Kecamatan juga.

d. Rencana pengembangan kawasan industri dan perdagangan

Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di Kota Banjarbaru berupa sector industri ringan, pergudangan, dan rumah tangga yang ramah lingkungan, sehingga industri polutif harus keluar dari wilayah Kota Banjarbaru. Untuk itu akan dilakukan relokasi ataupun pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan, serta pembatasan kawasan pergudangan di wilayah Banjarbaru untuk diarahkan kewilayah Liang Anggang.

e. Kawasan pengembangan wisata buatan

Rencana pengembangan kawasan wisata buatan meliputi pengembangan dan pelestarian objek wisata bersejarah, objek wisata pendidikan dan budaya, serta pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perumahan.

f. Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non-hijau (RTNH)

Rencana pengembangan terdiri dari RTNH publik : lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses masyarakat secara bebas; dan RTNH privat : plaza milik pribadi yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

g. Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal

Meliputi pembatasan ruang publik untuk kegiatan sektor informal (PKL) pada lokasi yang diperbolehkan, serta ketentuan batas gangguan yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

h. Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana

Terdapat rencana pengembangan ruang evakuasi bencana seperti banjir, longsor, kebakaran, dan puting beliung di sejumlah titik, serta pengembangan taman-taman skala lingkungan di kawasan perumahan, maupun di ruang terbuka publik yang cukup besar.

i. Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Banjarbaru terdiri dari kawasan pertanian dan keamanan, pertanian, serta pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.

Untuk mendukung realisasi perencanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diperlukan perhatian dan dukungan tersendiri dari sisi perizinan agar rencana pengembangan kawasan menjadi terarah. Dalam kaitannya untuk kepentingan pembangunan Kota Banjarbaru, DPM & PTSP Kota Banjarbaru perlu berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut dengan lembaga terkait lainnya seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Banjarbaru untuk dapat selektif dalam mengeluarkan izin-izin yang terkait dengan pembangunan agar tidak bertentangan dengan isu-isu strategis.

3.4.3. Rencana Kawasan Strategis

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, telah ditetapkan kriteria penentuan Kawasan strategis wilayah kabupaten yaitu sebagai berikut :

- a) memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- b) memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c) dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- d) dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki :
 - 1) potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - 2) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - 3) potensi ekspor;
 - 4) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - 5) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - 6) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - 7) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
 - 8) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
- e) dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan:
 - 1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - 2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

- 3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - 4) tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - 5) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - 6) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- f) merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain:
- 1) fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
 - 2) sumber daya alam strategis;
 - 3) fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan;
 - 4) fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - 5) fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- g) merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti:
- 1) empat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 2) kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - 3) kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluangmenimbulkankerusakan;
 - 4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

- 5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 6) kawasan rawan bencana alam; atau
 - 7) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- h) merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
- i) untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; dan
- j) mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis kabupaten sebagai berikut:
- 1) deliniasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan;
 - 2) pada peta kawasan strategis kabupaten juga harus digambarkan deliniasi kawasan strategis nasional dan/atau provinsi yang berada di dalam wilayah kabupaten bersangkutan;
 - 3) pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat perhatian setiap deliniasi kawasan strategis kabupaten; dan
 - 4) penggambaran peta kawasan strategis kabupaten harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008, Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Adapun Kawasan strategis yang termasuk dalam kawasan wilayah Kota Banjarbaru meliputi :

1. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; yang meliputi

- Kawasan Bandara Udara di Kecamatan Landasan Ulin
 - Kawasan Perdagangan dan jasa di Kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka
 - Kawasan Industri di Kecamatan Liang Anggang
2. Kawasan strategis sosial budaya;
- Kawasan dengan Nilai historis meliputi Taman Makam Hasan Basri dan Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana serta Makam Syuhada Haji
 - Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan di Kecamatan Cempaka
3. Kawasan strategis lingkungan hidup.
- Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Liang Anggang yang berfungsi sebagai penyeimbang tata guna air
 - RTH (termasuk di dalamnya hutan kota) dan ruang-ruang publik yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarbaru

3.4.4. Wilayah Rawan Bencana

Adapun bencana alam yang rawan di Kota Banjarbaru adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2005-2009 cukup tinggi pada tahun 2006 dengan jumlah titik panas sebanyak 167 dan cenderung menurun hingga tahun 2009 yang hanya sebanyak 14 titik panas karena faktor alam, yaitu hampir tidak ada musim kemarau yang jelas pada tahun-tahun terakhir .

Wilayah rawan bencana terdiri atas kawasan rawan bencana kebakaran dikelilingi lahan gambut di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kecamatan Cempaka. Kawasan rawan bencana angin putting beliung Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang. Kawasan rawan bencana banjir ringan di Kecamatan Cempaka.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru 2016-2021 dinilai baik. Hal ini ditandai dengan realisasi penanaman modal melebihi target yang telah ditentukan. Beberapa program internal sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Selama periode 2021-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi

perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan public dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan tidak diskriminatif. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pengarusutamaan gender (PUG) dijadikan strategi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional, yang mana hal tersebut dapat dicapai dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan di hadapi Kota Banjarbaru pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu strategis yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya investasi daerah dampak pandemi COVID-19;
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar. Mendasarkan pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum pada misi ke 2 yaitu **Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan tetap Menjaga ke Lestarian Lingkungan**. Sesuai dengan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yaitu **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan**.

Misi 3 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah** dengan tujuan **Meningkatkan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Bebas KKN** dengans sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.

Selain itu, dalam rangka pencapaian indikator kinerja terkait program-program rutin yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditetapkan juga tujuan yaitu:

1. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah.
 - ❖ Meningkatnya nilai investasi daerah dengan indikator tujuan Persentase Peningkatan Investasi Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator tujuan :
 - ❖ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan indikator tujuan:
 - ❖ Nilai SAKIP Kota

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penanaman Modal								
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	4%	4%	4%	4%	4%	4%
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi investasi	92.265.139.200	95.955.744.768	99.793.974.559	103.785.733.541	107.937.162.883	112.254.649.398
	Meningkatnya investor baru	Jumlah Investor Baru	20 Investor	22 Investor	24 Investor	26 Investor	28 Investor	30 Investor
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Investor yang melaksanakan investasi sesuai ketentuan	75%	77%	79%	81%	83%	85%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.75	88.00	88.25	88.50	88.75	89.00
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.97	4.00	4.02	4.05	4.07	4.10
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		Nilai SAKIP Kota	B	BB	BB	BB	A	A
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Daerah (Nilai AKIP)	76,8/BB	77/BB	78/BB	79/BB	80/A	80,1/A
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Internal yang di Fasilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Urusan kewenangan yang lainnya mengikuti contoh yang diberikan pada urusan pendidikan								
OPD tertentu yang kalimat tujuannva tidak terdapat dalam Bab 5 dan 6 RPJMD bisa membuat sendiri kalimat pernyataan tujuannya								

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut::

Tabel 5.1									
Misi 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN DENGAN KEARIFAN LOKAL DAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatkan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal		√	√			√
			Peningkatan Pembuatan Peta Potensi Investasi	√	√	√	√	√	√
	Meningkatnya investor baru	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Peningkatan penyelenggaraan promosi penanaman modal	√	√	√	√	√	√
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatkan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	√	√	√	√	√	√
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan Pengelolaan dan dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kab/Kota	√	√	√	√	√	√
Misi 3: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH									
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.	√	√	√	√	√	√
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah		Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√	√
			Penunjang Urusan pemerintah Daerah						
			Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√	√
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU									

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sementara kegiatan adalah Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana disajikan pada table berikut:



Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
					Tahun 2021		Tahun 2022	
					Target	Rp.	Target	
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	N/A	4%		4%	
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal		Nilai realisasi investasi	88.716.480.000	92.265.139.200	26.330.000	95.995.744.768	18
	Peningkatan Pemerian Fasillitas/Insentif Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas/insentif yang diberikan kepada Penanaman Modal	N/A	N/A	-	100%	50





	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan daerah tentang pemberian insentif yang ditetapkan (target 2022, 2024)	N/A	N/A	-	1 Dokumen	50
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemberian Fasilitas/Insentif	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM	N/A	N/A	-	1 Laporan	
	Peningkatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase Peta Potensi dan Peluang Investasi	N/A	100%	26.330.000	100%	13
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal yang Tersusun	N/A	1 Dok	26.330.000	1 Dok (RUPM)	60





	Tersedianya Kajian Potensi dan Peluang Investasi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha (Dokumen Kajian)	N/A	N/A	N/A	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	75
	Meningkatnya Investor Baru	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	18 Investor	20 Investor	343.740.000	22 Investor	35
	Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Unggulan Daerah yang dipromosikan	N/A	25%	343.740.000	25%	35
	Terlaksananya Fokum Diskusi/Sosialisasi/Temu Bisnis/kemitraan/pelatihan Terkait Strategi Promosi Penanaman Modal	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Fokum Diskusi/Sosialisasi/Temu Bisnis/kemitraan/pelatihan Terkait Strategi Promosi Penanaman Modal	N/A	1 Dokumen	173.740.000	1 Dokumen	18





	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan selama 1 Tahun	N/A	1 Kali	170.000.000	2 Kali	17
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentasi Investor yang Melaksanakan Investasi sesuai Ketentuan	N/A	75%	335.173.000	77%	36
	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang menindak lanjuti rekomendasi TIM	N/A	75%	335.173.000	77%	36
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal	Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pemantauan Penanaman modal	1 Dokumen, 35 Proyek PMDN/UM KM	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49





	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman Modal	Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal	1 kali BinteK/sosialisasi	7 kali BinteK/sosialisasi	185.773.000,00	7 kali BinteK/sosialisasi	22
	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal	35 Perusahaan	25 Perusahaan	99.600.000,00	30 Perusahaan	99
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informaasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	N/A	100%	551.659.000	100%	23
	Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada	Persentase Data yang Terverifikasi	N/A	100%	551.659.000	100%	23





		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan informasi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Data yang diolah Sesuai dengan Ketentuan	N/A	100%	551.659.00 0	100%	23
Meningk atkan Kualitas Pelayanan Publik		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.61	87.75		88.00	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,95	3.97	1.109.260.0 00	4.00	1.





	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan	100%	100%	1.109.260.000	100%	1.000
	Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pengaduan		Persentase Layanan Konsultasi yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%		100%	
			Persentase Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%		100%	
	Terselenggara nya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Elektronik	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Aplikasi yang digunakan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	647.259.500	2 Aplikasi	69





	Terpenuhinya Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Persentase Komitmen Perizinan dan NonPerizinan yang memenuhi syarat	100%	100%	214.440.50 0	100%	22
	Terlaksananya Layanan Konsultasi dan Pengaduan	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Persentase Konsultasi Perizinan yang diproses	100%	100%	247.560.00 0	100%	12
			Persentase Pengaduan yang diproses	100%	100%		100%	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemeberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi dan sinkronasi penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Per Tahun)	N/A	N/A	N/A	2 Investor	50
			Nilai SAKIP Kota	B	B		BB	





Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat akuntabilitas perangkat daerah	76,16 / BB	76,8 / BB	7.728.893.028	77 / BB	
	Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%		100%	
	Peningkatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	159.237.000	100%	
			Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%	100%		100%	
	Terlaksananya penyusunan perencanaan	Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	





	pembangunan SKPD	Perencanaan Perangkat Daerah	pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan					
			Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	
	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	124.237.00 0	5 Dokumen	
	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	3.926.02 4.178	100%	
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang menerima gaji	32 Orang	100%	3.881.024.1 78	100%	





			dan tunjangan tepat waktu					
	Terlaksananya monitoring capaian kinerja keuangan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	
	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tahunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun diakhir tahun sesuai ketentuan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	75.000.000	-	
	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	-	89 Buah	75.000.000	-	





	Peningkatan pengelolaan administrasi umum SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	804.859.850	100%	
	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 Jenis	20 Jenis	181.299.850	23 Jenis	
	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	8 Jenis	16 Jenis	244.822.000	20 Jenis	
	Terlaksananya penyediaan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	3 Jenis	49840 Lembar	75.000.000	550000 Lembar	
	Terlaksananya penyediaan barang cetakan		Jumlah barang cetakan yang tersedia		67 rim		70 Rim	
	Terlaksananya penyediaan bahan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku	12 Eks	12 Eks	14.760.000	12 Eks	





	bacaan dan buku peraturan		peraturan yang tersedia					
	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	N/A	4 Bulan	160.000.000	1 Tahun	
	Terlaksananya perjalanan dinas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	1 Tahun	15 Laporan	128.978.000	20 Laporan	
	Peningkatan penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	100%	1.201.428.000	100%	
	Terlaksananya pengadaan mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu dst) yang dibeli	2 Jenis	11 Buah	189.510.000	7 Buah	
	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	10 Jenis	39 Buah	451.520.000	17 Buah	





	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	6 Jenis	39 Buah	560.398.000	17 Buah	
	Peningkatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	471.000.000	100%	
	Terlaksananya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dapat digunakan	4 Jenis	4 Jenis	333.000.000	5 Jenis	
	Terlaksananya penyediaan pegawai administrasi kantor non ASN dan jasa	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	15 Orang	15 Orang	138.000.000	4 Orang	00
			Jumlah Jasa Pelayan Umum Kantor Lainnya				13 Orang	





	pelayanan umum kantor lainnya							
	Peningkatan penggunaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.091.34 4.000	100%	
	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Bangunan	-	-	2 Bangunan	
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabata n yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	59.440.0 00	1 Unit	





	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	11 Unit	12 Unit	156.918.000	11 Unit	
	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Jenis	4 Buah	7.000.000	6 Buah	





Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab						
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026								
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai realisasi investasi	N/A	4%	88.716.480.000	92.265.139.200	26.330.000	95.995.744.768	4%	185.000.000	99.793.974.559	300.000.000	103.785.733.541	4%	550.000.000	107.937.162.883	4%	550.000.000	112.254.649.398	4%	600.000.000	
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal																						
	Peningkatan Pemerian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas/insentif yang diberikan kepada Penanaman Modal	N/A	N/A	-	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000		Bidang Penanaman Modal	
	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/ Insentif	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan daerah tentang pemberian insentif yang ditetapkan (target 2022, 2024)	N/A	N/A	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000							
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemberian Fasilitas/ Insentif	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan PM	N/A	N/A	-	1 Laporan	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000					
	Peningkatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase Peta Potensi dan Peluang Investasi	N/A	100%	26.330.000	100%	135.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000					
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal yang Tersusun	N/A	1 Dok	26.330.000	1 Dok (RUPM)	60.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000					
	Tersedianya Kajian Potensi dan Peluang Investasi	Penyediaan Kajian Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha (Dokumen Kajian)	N/A	N/A	N/A	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	75.000.000	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	100.000.000	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	100.000.000	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	100.000.000	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	100.000.000	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	100.000.000					
	Meningkatnya Investor Baru	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	18 Investor	20 Investor	343.740.000	22 Investor	354.040.000	24 Investor	400.000.000	26 Investor	320.000.000	28 Investor	320.000.000	30 Investor	320.000.000					Bidang Penanaman		
	Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Unggulan Daerah yang dipromosikan	N/A	25%	343.740.000	25%	354.040.000	30%	400.000.000	30%	320.000.000	35%	320.000.000	35%	320.000.000							
	Terlaksananya Fokum Diskusi/ Sosialisasi/ Temu Bisnis/ kemitraan/ pelatihan Terkait Strategi Promosi Penanaman Modal	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Fokum Diskusi/ Sosialisasi/ Temu Bisnis/ kemitraan/ pelatihan Terkait Strategi Promosi Penanaman Modal	N/A	1 Dokumen	173.740.000	1 Dokumen	184.040.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000							
	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan selama 1 Tahun	N/A	1 Kali	170.000.000	2 Kali	170.000.000	2 Kali	210.000.000	2 Kali	250.000.000	2 Kali	250.000.000	2 Kali	250.000.000							
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentasi Investor yang Melaksanakan Investasi sesuai Ketentuan	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	79%	335.173.000	81%	335.173.000	83%	335.173.000	85%	335.173.000					Bidang Penanaman Modal		
	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang menindak lanjuti rekomendasi TIM	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	79%	335.173.000	81%	335.173.000	83%	335.173.000	85%	335.173.000							
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal	Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pemantauan Penanaman modal	1 Dokumen, 35 Proyek PMDN/UMKM	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00					
	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman Modal	Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal	1 kali Bintek/ sosialisasi	7 kali Bintek/ sosialisasi	185.773.000,00	7 kali Bintek/ sosialisasi	220.295.000,00	7 kali Bintek/ sosialisasi	185.773.000,00	7 kali Bintek/ sosialisasi	185.773.000,00	7 kali Bintek/ sosialisasi	185.773.000,00	7 kali Bintek/ sosialisasi	185.773.000,00	7 kali Bintek/ sosialisasi	185.773.000,00					
Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal	35 Perusahaan	25 Perusahaan	99.600.000,00	30 Perusahaan	99.600.000,00	35 Perusahaan	99.600.000,00	40 Perusahaan	99.600.000,00	45 Perusahaan	99.600.000,00	50 Perusahaan	99.600.000,00	50 Perusahaan	99.600.000,00						
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informaasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	300.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000	100%	318.362.400					Bidang Informasi & Pengaduan			
Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data yang Terverifikasi	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	300.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000	100%	318.362.400								
Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan informasi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Data yang diolah Sesuai dengan Ketentuan	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	300.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000	100%	318.362.400								





Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.61	87.75		88.00		88.25		88.50		88.75		89.00		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,95	3,97	1.109.260.000	4,00	1.098.959.950	4,02	1.181.327.301	4,05	1.240.724.301	4,07	1.300.121.301	4,10	1.359.518.301	Bidang PP, PPT dan IP
	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan	100%	100%	1.109.260.000	100%	1.098.959.950	100%	1.181.327.301	100%	1.240.724.301	100%	1.300.121.301	100%	1.359.518.301	
	Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pengaduan		Persentase Layanan Konsultasi yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%			
			Persentase Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%			
	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Elektronik	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Aplikasi yang digunakan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	647.259.500	2 Aplikasi	698.899.500	2 Aplikasi	723.899.500	2 Aplikasi	748.899.500	2 Aplikasi	773.899.500	2 Aplikasi	798.899.500	
	Terpenuhihaya Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Persentase Komitmen Perizinan dan NonPerizinan yang memenuhi syarat	100%	100%	214.440.500	100%	224.100.450	100%	247.070.801	100%	258.070.801	100%	269.070.801	100%	280.070.801	
	Terlaksananya Layanan Konsultasi dan Pengaduan	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Persentase Konsultasi Perizinan yang diproses	100%	100%	247.560.000	100%	125.960.000	100%	125.357.000	100%	138.754.000	100%	152.151.000	100%	165.548.000	
Persentase Pengaduan yang diproses			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Per	N/A	N/A	N/A	2 Investor	50.000.000	2 Investor	85.000.000	3 Investor	95.000.000	3 Investor	105.000.000	4 Investor	115.000.000		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kota	B	B		BB		BB		BB		A		A		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Predikat akuntabilitas perangkat daerah	76,16 / BB	76,8 / BB	7.728.893.028	77 / BB	6.041.579.409	78 / BB	7.420.477.350	79 / BB	7.999.688.085	80 / A	8.579.420.894	80,1 /A	9.253.073.098	Sekretariat
	Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Peningkatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	159.237.000	100%	116.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	161.051.000	
			Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	44.000.000	2 Dokumen	48.400.000	2 Dokumen	53.240.000	3 Dokumen	58.564.000	
			Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	124.237.000	5 Dokumen	76.000.000	5 Dokumen	77.000.000	5 Dokumen	84.700.000	5 Dokumen	93.170.000	5 Dokumen	102.487.000	
	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	3.926.024.178	100%	4.032.297.359	100%	4.097.207.350	100%	4.506.928.085	100%	4.957.620.894	100%	5.453.382.098	
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	32 Orang	100%	3.881.024.178	100%	3.987.297.359	100%	3.987.207.350	100%	4.385.928.085	100%	4.824.520.894	100%	5.306.972.098	
	Terlaksananya monitoring capaian kinerja keuangan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	60.500.000	2 Laporan	66.550.000	2 Laporan	73.205.000	
	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tahunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun diakhir tahun sesuai ketentuan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.500.000	1 Laporan	66.550.000	1 Laporan	73.205.000	
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	75.000.000	-	-	100%	75.000.000	-	0	-	0	100%	82.500.000	
	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	-	89 Buah	75.000.000	-	-	89 Buah	75.000.000	-	-	-	-	89 Buah	82.500.000	
	Peningkatan pengelolaan administrasi umum SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	804.859.850	100%	587.408.050	100%	1.066.640.000	100%	1.176.640.000	100%	1.286.140.000		1.360.640.000	
	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 Jenis	20 Jenis	181.299.850	23 Jenis	121.308.850	23 Jenis	170.000.000	24 Jenis	180.000.000	24 Jenis	185.000.000	24 Jenis	190.000.000	
	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	8 Jenis	16 Jenis	244.822.000	20 Jenis	175.699.200	23 Jenis	190.000.000	25 Jenis	200.000.000	28 Jenis	222.000.000	28 Jenis	225.000.000	





	Terlaksananya penyediaan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	3 Jenis	49840 Lembar	75.000.000	550000 Lembar	50.000.000	7 Jenis	70.000.000	7 Jenis	85.000.000	10 Jenis	95.000.000	10 Jenis	110.000.000	
	Terlaksananya penyediaan barang cetakan		Jumlah barang cetakan yang tersedia		67 rim		70 Rim		73 Rim		76 Rim		79 Rim		82 Rim		
	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan yang tersedia	12 Eks	12 Eks	14.760.000	12 Eks	14.760.000	12 Eks	25.000.000	12 Eks	30.000.000	12 Eks	32.500.000	12 Eks	34.000.000	
	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan	N/A	4 Bulan	160.000.000	1 Tahun	100.640.000	1 Tahun	311.640.000	1 Tahun	331.640.000	1 Tahun	351.640.000	1 Tahun	371.640.000	
	Terlaksananya perjalanan dinas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	1 Tahun	15 Laporan	128.978.000	20 Laporan	125.000.000	25 Laporan	300.000.000	30 Laporan	350.000.000	35 Laporan	400.000.000	40 Laporan	430.000.000	
	Peningkatan penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	100%	1.201.428.000	100%	275.000.000	100%	310.000.000	100%	276.000.000	100%	186.000.000		480.000.000	
	Terlaksananya pengadaan mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu dst) yang dibeli	2 Jenis	11 Buah	189.510.000	7 Buah	75.000.000	10 Buah	90.000.000	10 Buah	11.000.000	12 Buah	12.000.000	12 Buah	150.000.000	
	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	10 Jenis	39 Buah	451.520.000	17 Buah	100.000.000	17 Buah	110.000.000	22 Buah	125.000.000	25 Buah	14.000.000	25 Buah	150.000.000	
	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	6 Jenis	39 Buah	560.398.000	17 Buah	100.000.000	25 Buah	110.000.000	27 Buah	140.000.000	27 Buah	160.000.000	30 Buah	180.000.000	
	Peningkatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	471.000.000	100%	486.940.000	100%	1.000.630.000	100%	1.060.000.000	100%	1.094.000.000	100%	715.000.000	
	Terlaksananya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dapat digunakan	4 Jenis	4 Jenis	333.000.000	5 Jenis	287.500.000	5 Jenis	300.000.000	5 Jenis	340.000.000	5 Jenis	360.000.000	5 Jenis	375.000.000	
	Terlaksananya penyediaan pegawai administrasi kantor non ASN dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	15 Orang	15 Orang	138.000.000	4 Orang	199.440.000	38 Orang	700.630.000	40 Orang	720.000.000	40 Orang	734.000.000	40 Orang	340.000.000	
			Jumlah Jasa Pelayan Umum Kantor lainnya				13 Orang		13 Orang		13 Orang		13 Orang		13 Orang		
	Peningkatan penggunaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.091.344.000	100%	543.934.000	100%	750.000.000	100%	847.020.000	100%	909.250.000	100%	1.000.500.000	
	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Bangunan	-	-	2 Bangunan	75.000.000	2 Bangunan	80.000.000	2 Bangunan	93.000.000	2 Bangunan	98.000.000	2 Bangunan	110.000.000	
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	59.440.000	1 Unit	49.440.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	115.000.000	
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	11 Unit	12 Unit	156.918.000	11 Unit	134.994.000	11 Unit	175.000.000	11 Unit	190.270.000	11 Unit	200.000.000	11 Unit	230.500.000	
	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Jenis	4 Buah	7.000.000	6 Buah	4.000.000	7 Buah	20.000.000	8 Buah	35.000.000	8 Buah	40.750.000	8 Buah	45.000.000	
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Jenis	117 Buah	217.986.000	117 Buah	80.500.000	119 Buah	100.000.000	119 Buah	98.750.000	119 Buah	100.000.000	119 Buah	110.000.000	
	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara	2 Bangunan	2 Bangunan	650.000.000	2 Bangunan	200.000.000	2 Bangunan	300.000.000	2 Bangunan	340.000.000	2 Bangunan	370.500.000	2 Bangunan	390.000.000	
Pengisian kolom tujuan, sasaran, program harus sesuai dengan pengelompokan indikator program yang ada pada Bab IV				TOTAL		10.095.055.028		8.284.674.359		9.936.977.651		10.751.585.386		11.396.835.195		12.186.126.799	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Visi Kota Banjarbaru yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu “ **BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA**” dan untuk mencapai Misi pembangunan jangka menengah Kota Banjarbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru, khususnya pada urusan wajib bukan pelayanan dasar penanaman modal.

Indikator kinerja program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel.7.1

Indikator Kinerja Program DPMPSTP Kota Banjarbaru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Urusan Penanaman Modal									
1	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	N/A	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
2	Nilai realisasi investasi	88.716.480.000	92.265.139.200	95.955.744.768	99.793.974.559	103.785.733.541	107.937.162.883	112.254.649.398	112.254.649.398
3	Jumlah Investor Baru	N/A	20 Investor	22 Investor	24 Investor	26 Investor	28 Investor	30 Investor	30 Investor
4	Persentase Investor yang melaksanakan investasi sesuai ketentuan	N/A	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%
5	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.61	87.75	88.00	88.25	88.50	88.75	89.00	89.00
7	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.95	3.97	4.00	4.02	4.05	4.07	4.10	4.10
8	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai AKIP)	76.16	76,8/BB	77/BB	78/BB	79/BB	80/ A	80,1/ A	80,1/ A
9	Cakupan Pelayanan Internal yang di Fasilitas	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru terdapat 2 (dua) indikator yang menace pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru yaitu:

1. Persentase Peningkatan Investasi Daerah

Persentase peningkatan realisasi investasi adalah jumlah peningkatan nilai realisasi penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri di Kota Banjarbaru yang diterbitkan oleh BKPM.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai pengganti Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

3. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik/Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota, hasil evaluasi diberikan dalam bentuk angka.

4. Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan hasil nilai/peringkat.

5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Cakupan kesesuaian Laporan Keuangan PD dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan))

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Perangkat daerah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sedangkan Indikator kinerja kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel.7.2

Indikator Kinerja Kegiatan DPM&PTSP Kota Banjarbaru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RENSTRA (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase fasilitas/insentif yang diberikan kepada Penanaman Modal	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Peta Potensi dan Peluang Investasi	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Potensi Unggulan Daerah yang dipromosikan	N/A	25%	25%	30%	30%	35%	35%	35%
4	Persentase Investor yang menindak lanjuti rekomendasi TIM	N/A	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%
5	Persentase Data yang Terverifikasi	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Layanan Konsultasi yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

8.1. PENUTUP

Renstra DPMPTSP Kota Banjarbaru periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Banjarbaru untuk kurun waktu tahun 2021-2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf DPMPTSP Kota Banjarbaru. Pada dokumen Renstra ini telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan DPMPTSP Kota Banjarbaru dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renstra DPMPTSP Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dibantu oleh para pejabat struktural di lingkungan DPMPTSP Kota Banjarbaru;
2. Renstra DPMPTSP Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Tahunan DPMPTSP Kota Banjarbaru periode Tahun 2021 s.d. Tahun 2026;
3. Kinerja tahunan Renstra DPMPTSP Kota Banjarbaru Tahun 2021- 2026 yang tercermin dari pelaksanaan Renja setiap tahun dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra DPMPTSP periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan

Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021–2026.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dapat tercapai.

Banjarbaru, September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU,**

**Dr. Hj. RAHMAH KHAIRITA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197005031990022003**

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
			2021	2022	2023	2024
Penanaman Modal						
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	4%	4%	4%	4%
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi investasi	92.265.139.200	95.955.744.768	99.793.974.559	103.785.733.541
	Meningkatnya investor baru	Jumlah Investor Baru	20 Investor	22 Investor	24 Investor	26 Investor
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Investor yang melaksanakan investasi sesuai ketentuan	75%	77%	79%	81%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.75	88.00	88.25	88.50
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.97	4.00	4.02	4.05
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Kota	B	BB	BB	BB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Daerah (Nilai AKIP)	76,8/BB	77/BB	78/BB	79/BB
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Internal yang di Fasilitasi	100%	100%	100%	100%
Urusan kewenangan yang lainnya mengikuti contoh yang diberikan pada urusan pendidikan						
OPD tertentu yang kalimat tujuannya tidak terdapat dalam Bab 5 dan 6 RPJMD bisa membuat sendiri kalimat pernyataan tujuannya						

un Ke-	
2025	2026
4%	4%
107.937.162.883	112.254.649.398
28 Investor	30 Investor
83%	85%
100%	100%
88.75	89.00
4.07	4.10
A	A
80/A	80,1/A
100%	100%

Misi 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKUALITAS		

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatkan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Meningkatnya investor baru	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatkan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Misi 3: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH		
--	--	--

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	

Tabel 5.1

JG BERKELANJUTAN DENGAN KEARIFAN LOKAL DAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

Arah Kebijakan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Peningkatan penetapan pemberian fasilitasi/insentif dibidang penanaman modal		√	√		
Peningkatan Pembuatan Peta Potensi Investasi	√	√	√	√	√
Peningkatan penyelenggaraan promosi penanaman modal	√	√	√	√	√
Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	√	√	√	√	√
Peningkatan Pengelolaan dan dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kab/Kota	√	√	√	√	√

Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.	√	√	√	√	√
Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	√	√	√	√	√
Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√
Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√

KUNYAN	
	2026
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan	N/A	4%		4%		4%		4%		4%	
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal		Nilai realisasi investasi	88.716.480.000	92.265.139.200	26.330.000	95.995.744.768	185.000.000	99.793.974.559	300.000.000	103.785.733.541	550.000.000	107.937.162.883	550.000.000
	Peningkatan Pemerian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas/insentif yang diberikan kepada Penanaman Modal	N/A	N/A	-	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000
	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/ Insentif	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan daerah tentang pemberian insentif yang ditetapkan (target 2022, 2024)	N/A	N/A	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemberian Fasilitas/ Insentif	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan PM	N/A	N/A	-	1 Laporan	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000
	Peningkatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase Peta Potensi dan Peluang Investasi	N/A	100%	26.330.000	100%	135.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal yang Tersusun	N/A	1 Dok	26.330.000	1 Dok (RUPM)	60.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
	Tersedianya Kajian Potensi dan Peluang Investasi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha (Dokumen Kajian)	N/A	N/A	N/A	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	75.000.000	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	100.000.000	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	100.000.000	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	100.000.000
	Meningkatnya Investor Baru	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	18 Investor	20 Investor	343.740.000	22 Investor	354.040.000	24 Investor	400.000.000	26 Investor	320.000.000	28 Investor	320.000.000
	Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Unggulan Daerah yang dipromosikan	N/A	25%	343.740.000	25%	354.040.000	30%	400.000.000	30%	320.000.000	35%	320.000.000
	Terlaksananya Fokum Diskusi/Sosialisasi/ Temu Bisnis/kemitraan/pelatihan Terkait Strategi Promosi Penanaman Modal	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Fokum Diskusi/Sosialisasi/ Temu Bisnis/kemitraan/pelatihan Terkait Strategi Promosi Penanaman Modal	N/A	1 Dokumen	173.740.000	1 Dokumen	184.040.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000
	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan selama 1 Tahun	N/A	1 Kali	170.000.000	2 Kali	170.000.000	2 Kali	210.000.000	2 Kali	250.000.000	2 Kali	250.000.000
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentasi Investor yang Melaksanakan Investasi sesuai Ketentuan	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	79%	335.173.000	81%	335.173.000	83%	335.173.000
	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang menindak lanjuti rekomendasi TIM	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	79%	335.173.000	81%	335.173.000	83%	335.173.000
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal	Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pemantauan Penanaman modal	1 Dokumen, 35 Proyek PMDN/UMKM	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00
	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman Modal	Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal	1 kali BinteK/ sosialisasi	7 kali BinteK/ sosialisasi	185.773.000,00	7 kali BinteK/ sosialisasi	220.295.000,00	7 kali BinteK/ sosialisasi	185.773.000,00	7 kali BinteK/ sosialisasi	185.773.000,00	7 kali BinteK/ sosialisasi	185.773.000,00
	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal	35 Perusahaan	25 Perusahaan	99.600.000,00	30 Perusahaan	99.600.000,00	35 Perusahaan	99.600.000,00	40 Perusahaan	99.600.000,00	45 Perusahaan	99.600.000,00
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informaasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	300.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000
	Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data yang Terverifikasi	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	300.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000
	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan informasi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Data yang diolah Sesuai dengan Ketentuan	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	300.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.61	87.75		88.00		88.25		88.50		88.75		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,95	3.97	1.109.260.000	4.00	1.098.959.950	4.02	1.181.327.301	4.05	1.240.724.301	4.07	1.300.121.301	
	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan	100%	100%	1.109.260.000	100%	1.098.959.950	100%	1.181.327.301	100%	1.240.724.301	100%	1.300.121.301
	Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pengaduan		Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Konsultasi yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti		100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Elektronik	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Aplikasi yang digunakan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	647.259.500	2 Aplikasi	698.899.500	2 Aplikasi	723.899.500	2 Aplikasi	748.899.500	2 Aplikasi	773.899.500	
	Terpenuhinya Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Persentase Komitmen Perizinan dan NonPerizinan yang memenuhi syarat	100%	100%	214.440.500	100%	224.100.450	100%	247.070.801	100%	258.070.801	100%	269.070.801	
	Terlaksananya Layanan Konsultasi dan Pengaduan	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Persentase Konsultasi Perizinan yang diproses	100%	100%	247.560.000	100%	125.960.000	100%	125.357.000	100%	138.754.000	100%	152.151.000	
			Persentase Pengaduan yang diproses	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi dan sinkronasi penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Per Tahun)	N/A	N/A	N/A	2 Investor	50.000.000	2 Investor	85.000.000	3 Investor	95.000.000	3 Investor	105.000.000		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kota	B	B		BB		BB		BB		A		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Predikat akuntabilitas perangkat daerah	76,16 / BB	76,8 / BB	7.728.893.028	77 / BB	6.041.579.409	78 / BB	7.420.477.350	79 / BB	7.999.688.085	80 / A	8.579.420.894	
	Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Peningkatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	159.237.000	100%	116.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	
			Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	44.000.000	2 Dokumen	48.400.000	2 Dokumen	53.240.000	
			Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	124.237.000	5 Dokumen	76.000.000	5 Dokumen	77.000.000	5 Dokumen	84.700.000	5 Dokumen	93.170.000	
	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	3.926.024.178	100%	4.032.297.359	100%	4.097.207.350	100%	4.506.928.085	100%	4.957.620.894	
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	32 Orang	100%	3.881.024.178	100%	3.987.297.359	100%	3.987.207.350	100%	4.385.928.085	100%	4.824.520.894	
	Terlaksananya monitoring capaian kinerja keuangan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	60.500.000	2 Laporan	66.550.000	
	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tahunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun diakhir tahun sesuai ketentuan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.500.000	1 Laporan	66.550.000	
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	75.000.000	-	-	100%	75.000.000	-	0	-	0	
	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	-	89 Buah	75.000.000	-	-	89 Buah	75.000.000	-	-	-	-	
	Peningkatan pengelolaan administrasi umum SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	804.859.850	100%	587.408.050	100%	1.066.640.000	100%	1.176.640.000	100%	1.286.140.000	
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 Jenis	20 Jenis	181.299.850	23 Jenis	121.308.850	23 Jenis	170.000.000	24 Jenis	180.000.000	24 Jenis	185.000.000		
Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	8 Jenis	16 Jenis	244.822.000	20 Jenis	175.699.200	23 Jenis	190.000.000	25 Jenis	200.000.000	28 Jenis	222.000.000		

Terlaksananya penyediaan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	3 Jenis	49840 Lembar	75.000.000	550000 Lembar	50.000.000	7 Jenis	70.000.000	7 Jenis	85.000.000	10 Jenis	95.000.000
Terlaksananya penyediaan barang cetakan		Jumlah barang cetakan yang tersedia		67 rim		70 Rim		73 Rim		76 Rim		79 Rim	
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan yang tersedia	12 Eks	12 Eks	14.760.000	12 Eks	14.760.000	12 Eks	25.000.000	12 Eks	30.000.000	12 Eks	32.500.000
Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan	N/A	4 Bulan	160.000.000	1 Tahun	100.640.000	1 Tahun	311.640.000	1 Tahun	331.640.000	1 Tahun	351.640.000
Terlaksananya perjalanan dinas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	1 Tahun	15 Laporan	128.978.000	20 Laporan	125.000.000	25 Laporan	300.000.000	30 Laporan	350.000.000	35 Laporan	400.000.000
Peningkatan penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	100%	1.201.428.000	100%	275.000.000	100%	310.000.000	100%	276.000.000	100%	186.000.000
Terlaksananya pengadaan mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu dst) yang dibeli	2 Jenis	11 Buah	189.510.000	7 Buah	75.000.000	10 Buah	90.000.000	10 Buah	11.000.000	12 Buah	12.000.000
Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	10 Jenis	39 Buah	451.520.000	17 Buah	100.000.000	17 Buah	110.000.000	22 Buah	125.000.000	25 Buah	14.000.000
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	6 Jenis	39 Buah	560.398.000	17 Buah	100.000.000	25 Buah	110.000.000	27 Buah	140.000.000	27 Buah	160.000.000
Peningkatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	471.000.000	100%	486.940.000	100%	1.000.630.000	100%	1.060.000.000	100%	1.094.000.000
Terlaksananya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dapat digunakan	4 Jenis	4 Jenis	333.000.000	5 Jenis	287.500.000	5 Jenis	300.000.000	5 Jenis	340.000.000	5 Jenis	360.000.000
Terlaksananya penyediaan pegawai administrasi kantor non ASN dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	15 Orang	15 Orang	138.000.000	4 Orang	199.440.000	38 Orang	700.630.000	40 Orang	720.000.000	40 Orang	734.000.000
		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Lainnya				13 Orang		13 Orang		13 Orang		13 Orang	
Peningkatan penggunaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.091.344.000	100%	543.934.000	100%	750.000.000	100%	847.020.000	100%	909.250.000
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Bangunan	-	-	2 Bangunan	75.000.000	2 Bangunan	80.000.000	2 Bangunan	93.000.000	2 Bangunan	98.000.000
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	59.440.000	1 Unit	49.440.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	100.000.000
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	11 Unit	12 Unit	156.918.000	11 Unit	134.994.000	11 Unit	175.000.000	11 Unit	190.270.000	11 Unit	200.000.000
Terlaksananya pemeliharaan mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Jenis	4 Buah	7.000.000	6 Buah	4.000.000	7 Buah	20.000.000	8 Buah	35.000.000	8 Buah	40.750.000
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Jenis	117 Buah	217.986.000	117 Buah	80.500.000	119 Buah	100.000.000	119 Buah	98.750.000	119 Buah	100.000.000
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara	2 Bangunan	2 Bangunan	650.000.000	2 Bangunan	200.000.000	2 Bangunan	300.000.000	2 Bangunan	340.000.000	2 Bangunan	370.500.000
Pengisian kolom tujuan, sasaran, program harus sesuai dengan pengelompokan indikator program yang ada pada Bab IV			TOTAL		10.095.055.028		8.284.674.359		9.936.977.651		10.751.585.386		11.396.835.195

Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
Target	Rp.	
4%		
112.254.649.398	600.000.000	
100%	450.000.000	Bidang Penanaman Modal
1 Dokumen	50.000.000	
1 Laporan	100.000.000	
100%	150.000.000	
1 Laporan	50.000.000	
1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	100.000.000	
30 Investor	320.000.000	Bidang Penanaman
35%	320.000.000	
1 Dokumen	70.000.000	
2 Kali	250.000.000	
85%	335.173.000	Bidang Penanaman Modal
85%	335.173.000	
43 Kali	49.800.000,00	
7 kali Bintek/ sosialisasi	185.773.000,00	
50 Perusahaan	99.600.000,00	
100%	318.362.400	Bidang Informasi & Pengaduan
100%	318.362.400	
100%	318.362.400	

89,00		
4.10	1.359.518.301	Bidang PP, PPT dan IP
100%	1.359.518.301	
100%		
100%		
2 Aplikasi	798.899.500	
100%	280.070.801	
100%	165.548.000	
100%		
4 Investor	115.000.000	
A		
80,1 /A	9.253.073.098	Sekretariat
100%		
100%	161.051.000	
100%		
3 Dokumen	58.564.000	
1 Dokumen		
5 Dokumen	102.487.000	
100%	5.453.382.098	
100%	5.306.972.098	
2 Laporan	73.205.000	
1 Laporan	73.205.000	
100%	82.500.000	
89 Buah	82.500.000	
	1.360.640.000	
24 Jenis	190.000.000	
28 Jenis	225.000.000	

10 Jenis	110.000.000	
82 Rim		
12 Eks	34.000.000	
1 Tahun	371.640.000	
40 Laporan	430.000.000	
	480.000.000	
12 Buah	150.000.000	
25 Buah	150.000.000	
30 Buah	180.000.000	
100%	715.000.000	
5 Jenis	375.000.000	
40 Orang	340.000.000	
13 Orang		
100%	1.000.500.000	
2 Bangunan	110.000.000	
1 Unit	115.000.000	
11 Unit	230.500.000	
8 Buah	45.000.000	
119 Buah	110.000.000	
2 Bangunan	390.000.000	
	12.186.126.799	

Tabel.7.1

Indikator Kinerja Program DPMPTSP Kota Banjarbaru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

[illegible]

Tabel.7.2

Indikator Kinerja Kegiatan DPM&PTSP Kota Banjarbaru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

[illegible]

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
			2021	2022	2023	2024
Penanaman Modal						
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	4%	4%	4%	4%
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi investasi	92.265.139.200	95.955.744.768	99.793.974.559	103.785.733.541
	Meningkatnya investor baru	Jumlah Investor Baru	20 Investor	22 Investor	24 Investor	26 Investor
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Investor yang melaksanakan investasi sesuai ketentuan	75%	77%	79%	81%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.75	88.00	88.25	88.50
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.97	4.00	4.02	4.05
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Kota	B	BB	BB	BB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Daerah (Nilai AKIP)	76,8/BB	77/BB	78/BB	79/BB
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Internal yang di Fasilitasi	100%	100%	100%	100%
Urusan kewenangan yang lainnya mengikuti contoh yang diberikan pada urusan pendidikan						
OPD tertentu yang kalimat tujuannya tidak terdapat dalam Bab 5 dan 6 RPJMD bisa membuat sendiri kalimat pernyataan tujuannya						

un Ke-	
2025	2026
4%	4%
107.937.162.883	112.254.649.398
28 Investor	30 Investor
83%	85%
100%	100%
88.75	89.00
4.07	4.10
A	A
80/A	80,1/A
100%	100%

Tabel 5.1

Misi 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN DENGAN KEARIFAN LOKAL DAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatkan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan penetapan pemberian fasilitasi/ insentif dibidang penanaman modal		√	√			√
			Peningkatan Pembuatan Peta Potensi Investasi	√	√	√	√	√	√
	Meningkatnya investor baru	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Peningkatan penyelenggaraan promosi penanaman modal	√	√	√	√	√	√
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan Pengelolaan dan dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kab/Kota	√	√	√	√	√	√
Misi 3: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH									
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.	√	√	√	√	√	√
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah		Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√

		Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√

Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	N/A	4%		46,5%		65,70%		75%		85%	
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal		Nilai realisasi investasi	88.716.480.000	92.265.139.200	26.330.000	130.000.000.000	185.000.000	147.000.000.000	300.000.000	155.519.989.440	250.000.000	164.125.488.000	250.000.000
	Peningkatan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	N/A	N/A	-	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
	Ditetapkannya kebijakan daerah tentang pemberian insentif yang tersusun	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan penanaman modal	N/A	N/A	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-
	Terlaksananya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan usaha di daerah	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	N/A	N/A	-	-	-	2 Kegiatan Usaha	100.000.000	2 Kegiatan Usaha	100.000.000	2 Kegiatan Usaha	100.000.000
	Peningkatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase Peta Potensi dan Peluang Investasi	N/A	100%	26.330.000	100%	135.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000
	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	N/A	1 Dok	26.330.000	1 Dok (RUPM)	60.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000
	Tersedianya kajian potensi dan peluang investasi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha	N/A	N/A	N/A	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	75.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
	Meningkatnya Investor Baru	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	18 Investor	20 Investor	343.740.000	22 Investor	354.040.000	24 Investor	550.000.000	26 Investor	470.000.000	28 Investor	350.000.000
	Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Unggulan Daerah yang dipromosikan	N/A	25%	343.740.000	25%	354.040.000	50%	550.000.000	50%	470.000.000	50%	350.000.000
	Tersusunnya Peraturan Daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	173.740.000	1 Dokumen	184.040.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	70.000.000
	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan hasil promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	N/A	1 Kali	170.000.000	2 Dokumen	170.000.000	3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	280.000.000	3 Dokumen	280.000.000
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penanam Modal yang melaksanakan kegiatan investasi sesuai ketentuan	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	79%	469.695.000	81%	335.173.000	83%	335.173.000
	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	80%	469.695.000	85%	335.173.000	85%	335.173.000
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1 Dokumen, 35 Proyek PMDN/UMKM	12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	12 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00	12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal bagi pelaku usaha	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1 kali BinteK/ sosialisas i	7 kali BinteK/ sosialisasi	185.773.000,00	225 Pelaku Usaha	220.295.000,00	235 Pelaku Usaha	315.275.000,00	240 Pelaku Usaha	185.773.000,00	245 Pelaku Usaha	185.773.000,00
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	35 Perusahaan	25 Perusahaan	99.600.000,00	12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00	12 Kegiatan Usaha	54.420.000,00	12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00	12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	350.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000
	Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah data yang diolah, dikaji dan di manfaatkan	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	350.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000

	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	12 Dokumen	350.000.000	12 Dokumen	306.000.000	12 Dokumen	312.120.000	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.61	87.75		88,5		90		88.50		88.75		
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,95	3.97	1.109.260.000	4.52	1.098.959.950	4.52	1.735.000.000	4.05	1.794.397.000	4.07	1.853.794.000	
	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan	100%	100%	1.109.260.000	100%	1.098.959.950	100%	1.735.000.000	100%	1.794.397.000	100%	1.853.794.000	
	Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pengaduan	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Konsultasi dan pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
IKM	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2 Aplikasi	2 Aplikasi	647.259.500	4500 Pelaku Usaha	698.899.500	2.500 Pelaku Usaha	1.200.000.000	5.500 Pelaku Usaha	1.225.000.000	6.000 Pelaku Usaha	1.250.000.000	
	Terlaksananya pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100%	100%	214.440.500	18.000 Kegiatan Usaha	224.100.450	12 Kegiatan Usaha	300.000.000	20.000 Kegiatan Usaha	311.000.000	21.000 Kegiatan Usaha	322.000.000	
	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	100%	100%	247.560.000	7.000 Orang	125.960.000	2.500 Orang	150.000.000	8.000 Orang	163.397.000	8.500 Orang	176.794.000	
	Terlaksananya Koordnasi dan Sinkronisasi penetapan Pemberian fasilitas/insentif daerah bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelau usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	N/A	N/A	N/A	2 Kegiatan Usaha	50.000.000	2 Kegiatan Usaha	85.000.000	4 Kegiatan Usaha	95.000.000	6 Kegiatan Usaha	105.000.000	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kota	B	B		BB		BB		BB		A	
		Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah		Predikat akuntabilitas perangkat daerah	76,16 / BB	76,8 / BB	7.728.893.028	77 / BB	5.743.260.605	78 / BB	6.742.040.983	79 / BB	8.098.688.085	80 / A	8.813.420.894
	Peningkatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	159.237.000	100%	116.000.000	100%	124.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	
			Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	44.000.000	2 Dokumen	48.400.000	3 Dokumen	53.240.000	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	124.237.000	5 Dokumen	76.000.000	5 Laporan	80.000.000	5 Laporan	84.700.000	5 Laporan	93.170.000	
	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	3.926.024.178	100%	3.733.978.555	100%	4.067.207.350	100%	4.506.928.085	100%	4.957.620.894	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang	100%	3.881.024.178	100%	3.688.978.555	43 Orang/12 Bulan	3.987.207.350	43 Orang/12 Bulan	4.385.928.085	48 Orang/12 Bulan	4.824.520.894	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	60.500.000	2 Laporan	66.550.000	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	60.500.000	1 Laporan	66.550.000	

Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	75.000.000	-	-	100%	75.000.000	-	0	-	0
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	-	89 Buah	75.000.000	-	-	85 Paket	75.000.000	-	-	-	-
Peningkatan pengelolaan administrasi umum SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	804.859.850	100%	587.408.050	100%	825.000.000	100%	1.176.640.000	100%	1.286.140.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	20 Jenis	181.299.850	23 Jenis	121.308.850	23 Paket	125.000.000	25 Paket	180.000.000	27 Paket	185.000.000
Tersedianya bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Jenis	16 Jenis	244.822.000	20 Jenis	175.699.200	22 Paket	190.000.000	25 Paket	200.000.000	25 Paket	222.000.000
Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	49840 Lembar	75.000.000	550000 Lembar	50.000.000	12 Paket	70.000.000	13 Paket	85.000.000	12 Paket	95.000.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 Eks	12 Eks	14.760.000	12 Eks	14.760.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	32.500.000
Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	N/A	4 Bulan	160.000.000	1 Tahun	100.640.000	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	331.640.000	12 Laporan	351.640.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	15 Laporan	128.978.000	20 Laporan	125.000.000	23 Laporan	300.000.000	26 Laporan	350.000.000	26 Laporan	400.000.000
Peningkatan penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	100%	1.201.428.000	100%	275.000.000	100%	400.000.000	100%	375.000.000	100%	420.000.000
Tersedianya mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Jenis	11 Buah	189.510.000	7 Buah	75.000.000	20 Unit	110.000.000	10 Unit	110.000.000	10 Unit	120.000.000
Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Jenis	39 Buah	451.520.000	17 Buah	100.000.000	17 Unit	180.000.000	15 Unit	125.000.000	15 Unit	140.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	6 Jenis	39 Buah	560.398.000	17 Buah	100.000.000	4 Unit	110.000.000	17 Unit	140.000.000	18 Unit	160.000.000
Peningkatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	471.000.000	100%	486.940.000	100%	605.833.633	100%	1.060.000.000	100%	1.094.000.000
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dapat digunakan	4 Jenis	4 Jenis	333.000.000	5 Jenis	287.500.000	5 Laporan	300.000.000	5 Laporan	340.000.000	5 Laporan	360.000.000
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	15 Orang	15 Orang	138.000.000	4 Orang	199.440.000	12 Laporan	305.833.633	8 Laporan	720.000.000	8 Laporan	734.000.000
Peningkatan penggunaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.091.344.000	100%	543.934.000	100%	645.000.000	100%	847.020.000	100%	909.250.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Bangunan	-	-	2 Bangunan	75.000.000	3 Unit	100.000.000	2 Unit	93.000.000	2 Unit	98.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	59.440.000	1 Unit	49.440.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	100.000.000
Tersedianya Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit	12 Unit	156.918.000	11 Unit	134.994.000	13 Unit	175.000.000	13 Unit	190.270.000	13 Unit	200.000.000
Terlaksananya pemeliharaan mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Jenis	4 Buah	7.000.000	6 Buah	4.000.000	10 Unit	20.000.000	12 Unit	35.000.000	14 Unit	40.750.000
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Jenis	117 Buah	217.986.000	117 Buah	80.500.000	120 Unit	100.000.000	124 Unit	98.750.000	129 Unit	100.000.000
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Bangunan	2 Bangunan	650.000.000	2 Bangunan	200.000.000	1 Unit	200.000.000	2 Unit	340.000.000	2 Unit	370.500.000
Pengisian kolom tujuan, sasaran, program harus sesuai dengan pengelompokan indikator program yang ada pada Bab IV			TOTAL		10.095.055.028		7.986.355.555		10.146.735.983		11.254.258.085		11.914.507.894

Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
Target	Rp.	
100%		
177.432.960.000	300.000.000	
100%	150.000.000	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi PM
1 Dokumen	50.000.000	
2 Kegiatan Usaha	100.000.000	
100%	150.000.000	
1 Dokumen	50.000.000	
1 Dokumen	100.000.000	
30 Investor	350.000.000	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi
50%	350.000.000	
1 Dokumen	70.000.000	
3 Dokumen	280.000.000	
85%	335.173.000	Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM
90%	335.173.000	
12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00	
250 Pelaku Usaha	185.773.000,00	
12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00	
100%	318.362.400	Bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan
100%	318.362.400	

12 Dokumen	318.362.400	
89.00		
4.10	1.913.191.000	Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan
100%	1.913.191.000	
100%		
6.500 Pelaku Usaha	1.275.000.000	
22.000 Kegiatan Usaha	333.000.000	
9.000 Orang	190.191.000	
8 Kegiatan Usaha	115.000.000	
A		
80,1 / A	9.253.073.098	Sekretariat
100%		
100%	161.051.000	
100%		
3 Dokumen	58.564.000	
5 Laporan	102.487.000	
100%	5.453.382.098	
53 Orang/12 Bulan	5.306.972.098	
2 Laporan	73.205.000	
1 Laporan	73.205.000	

100%	82.500.000	
100 Paket	82.500.000	
	1.360.640.000	
27 Paket	190.000.000	
25 Paket	225.000.000	
12 Paket	110.000.000	
12 Dokumen	34.000.000	
12 Laporan	371.640.000	
30 Laporan	430.000.000	
	480.000.000	
10 Unit	150.000.000	
17 Unit	150.000.000	
19 Unit	180.000.000	
100%	715.000.000	
5 Laporan	375.000.000	
8 Laporan	340.000.000	
100%	1.000.500.000	
2 Unit	110.000.000	
1 Unit	115.000.000	
13 Unit	230.500.000	
16 Unit	45.000.000	
134 Unit	110.000.000	
2 Unit	390.000.000	
	12.469.799.498	

Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	N/A	4%		46,5%		65,70%		75%		85%	
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal		Nilai realisasi investasi	88.716.480.000	92.265.139.200	26.330.000	130.000.000.000	185.000.000	147.000.000.000	300.000.000	155.519.989.440	250.000.000	164.125.488.000	250.000.000
	Peningkatan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	N/A	N/A	-	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
	Ditetapkannya kebijakan daerah tentang pemberian insentif yang tersusun	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan penanaman modal	N/A	N/A	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-
	Terlaksananya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan usaha di daerah	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	N/A	N/A	-	-	-	2 Kegiatan Usaha	100.000.000	2 Kegiatan Usaha	100.000.000	2 Kegiatan Usaha	100.000.000
	Peningkatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase Peta Potensi dan Peluang Investasi	N/A	100%	26.330.000	100%	135.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000
	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	N/A	1 Dok	26.330.000	1 Dok (RUPM)	60.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000
	Tersedianya kajian potensi dan peluang investasi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha	N/A	N/A	N/A	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	75.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
	Meningkatnya Investor Baru	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	18 Investor	20 Investor	343.740.000	22 Investor	354.040.000	24 Investor	550.000.000	26 Investor	470.000.000	28 Investor	350.000.000
	Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Unggulan Daerah yang dipromosikan	N/A	25%	343.740.000	25%	354.040.000	50%	550.000.000	50%	470.000.000	50%	350.000.000
	Tersusunnya Peraturan Daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	173.740.000	1 Dokumen	184.040.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	70.000.000
	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan hasil promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	N/A	1 Kali	170.000.000	2 Dokumen	170.000.000	3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	280.000.000	3 Dokumen	280.000.000
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penanam Modal yang melaksanakan kegiatan investasi sesuai ketentuan	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	79%	469.695.000	81%	335.173.000	83%	335.173.000
	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	80%	469.695.000	85%	335.173.000	85%	335.173.000
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1 Dokumen, 35 Proyek PMDN/UMKM	12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	12 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00	12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal bagi pelaku usaha	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1 kali BinteK/ sosialisas i	7 kali BinteK/ sosialisasi	185.773.000,00	225 Pelaku Usaha	220.295.000,00	235 Pelaku Usaha	315.275.000,00	240 Pelaku Usaha	185.773.000,00	245 Pelaku Usaha	185.773.000,00
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	35 Perusahaan	25 Perusahaan	99.600.000,00	12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00	12 Kegiatan Usaha	54.420.000,00	12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00	12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	350.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000
	Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah data yang diolah, dikaji dan di manfaatkan	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	350.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000

	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dioalah, dikaji dan dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dioalah, dikaji dan dimanfaatkan	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	12 Dokumen	350.000.000	12 Dokumen	306.000.000	12 Dokumen	312.120.000
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.61	87.75		90.0		90		88.50		88.75	
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,95	3.97	1.109.260.000	4.52	1.098.959.950	4.52	1.735.000.000	4.05	1.794.397.000	4.07	1.853.794.000
	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Felayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan	100%	100%	1.109.260.000	100%	1.098.959.950	100%	1.735.000.000	100%	1.794.397.000	100%	1.853.794.000
	Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pengaduan		Persentase Layanan Konsultasi dan pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
IKM	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2 Aplikasi	2 Aplikasi	647.259.500	4500 Pelaku Usaha	698.899.500	2.500 Pelaku Usaha	1.200.000.000	5.500 Pelaku Usaha	1.225.000.000	6.000 Pelaku Usaha	1.250.000.000
	Terlaksananya pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100%	100%	214.440.500	18.000 Kegiatan Usaha	224.100.450	12 Kegiatan Usaha	300.000.000	20.000 Kegiatan Usaha	311.000.000	21.000 Kegiatan Usaha	322.000.000
	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	100%	100%	247.560.000	7.000 Orang	125.960.000	2.500 Orang	150.000.000	8.000 Orang	163.397.000	8.500 Orang	176.794.000
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan Pemberian fasilitas/insentif daerah bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	N/A	N/A	N/A	2 Kegiatan Usaha	50.000.000	2 Kegiatan Usaha	85.000.000	4 Kegiatan Usaha	95.000.000	6 Kegiatan Usaha	105.000.000
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kota	B	B		BB		BB		BB		A	
			Predikat akuntabilitas perangkat daerah	76,16 / BB	76,8 / BB	7.728.893.028	77 / BB	5.743.260.605	78 / BB	6.742.040.983	79 / BB	8.098.688.085	80 / A	8.813.420.894
	Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Peningkatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	159.237.000	100%	116.000.000	100%	124.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000
			Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	44.000.000	2 Dokumen	48.400.000	3 Dokumen	53.240.000
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	124.237.000	5 Dokumen	76.000.000	5 Laporan	80.000.000	5 Laporan	84.700.000	5 Laporan	93.170.000
	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	3.926.024.178	100%	3.733.978.555	100%	4.067.207.350	100%	4.506.928.085	100%	4.957.620.894
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang	100%	3.881.024.178	100%	3.688.978.555	43 Orang/12 Bulan	3.987.207.350	43 Orang/12 Bulan	4.385.928.085	48 Orang/12 Bulan	4.824.520.894
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	60.500.000	2 Laporan	66.550.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	60.500.000	1 Laporan	66.550.000

Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	75.000.000	-	-	100%	75.000.000	-	0	-	0
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	-	89 Buah	75.000.000	-	-	85 Paket	75.000.000	-	-	-	-
Peningkatan pengelolaan administrasi umum SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	804.859.850	100%	587.408.050	100%	825.000.000	100%	1.176.640.000	100%	1.286.140.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	20 Jenis	181.299.850	23 Jenis	121.308.850	23 Paket	125.000.000	25 Paket	180.000.000	27 Paket	185.000.000
Tersedianya bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Jenis	16 Jenis	244.822.000	20 Jenis	175.699.200	22 Paket	190.000.000	25 Paket	200.000.000	25 Paket	222.000.000
Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	49840 Lembar	75.000.000	550000 Lembar	50.000.000	12 Paket	70.000.000	13 Paket	85.000.000	12 Paket	95.000.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 Eks	12 Eks	14.760.000	12 Eks	14.760.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	32.500.000
Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	N/A	4 Bulan	160.000.000	1 Tahun	100.640.000	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	331.640.000	12 Laporan	351.640.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	15 Laporan	128.978.000	20 Laporan	125.000.000	23 Laporan	300.000.000	26 Laporan	350.000.000	26 Laporan	400.000.000
Peningkatan penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	100%	1.201.428.000	100%	275.000.000	100%	400.000.000	100%	375.000.000	100%	420.000.000
Tersedianya mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Jenis	11 Buah	189.510.000	7 Buah	75.000.000	20 Unit	110.000.000	10 Unit	110.000.000	10 Unit	120.000.000
Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Jenis	39 Buah	451.520.000	17 Buah	100.000.000	17 Unit	180.000.000	15 Unit	125.000.000	15 Unit	140.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	6 Jenis	39 Buah	560.398.000	17 Buah	100.000.000	4 Unit	110.000.000	17 Unit	140.000.000	18 Unit	160.000.000
Peningkatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	471.000.000	100%	486.940.000	100%	605.833.633	100%	1.060.000.000	100%	1.094.000.000
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dapat digunakan	4 Jenis	4 Jenis	333.000.000	5 Jenis	287.500.000	5 Laporan	300.000.000	5 Laporan	340.000.000	5 Laporan	360.000.000
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	15 Orang	15 Orang	138.000.000	4 Orang	199.440.000	12 Laporan	305.833.633	8 Laporan	720.000.000	8 Laporan	734.000.000
Peningkatan penggunaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.091.344.000	100%	543.934.000	100%	645.000.000	100%	847.020.000	100%	909.250.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Bangunan	-	-	2 Bangunan	75.000.000	3 Unit	100.000.000	2 Unit	93.000.000	2 Unit	98.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	59.440.000	1 Unit	49.440.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	100.000.000
Tersedianya Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit	12 Unit	156.918.000	11 Unit	134.994.000	13 Unit	175.000.000	13 Unit	190.270.000	13 Unit	200.000.000
Terlaksananya pemeliharaan mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Jenis	4 Buah	7.000.000	6 Buah	4.000.000	10 Unit	20.000.000	12 Unit	35.000.000	14 Unit	40.750.000
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Jenis	117 Buah	217.986.000	117 Buah	80.500.000	120 Unit	100.000.000	124 Unit	98.750.000	129 Unit	100.000.000
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Bangunan	2 Bangunan	650.000.000	2 Bangunan	200.000.000	1 Unit	200.000.000	2 Unit	340.000.000	2 Unit	370.500.000
Pengisian kolom tujuan, sasaran, program harus sesuai dengan pengelompokan indikator program yang ada pada Bab IV			TOTAL		10.095.055.028		7.986.355.555		10.146.735.983		11.254.258.085		11.914.507.894

Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
Target	Rp.	
100%		
177.432.960.000	300.000.000	
100%	150.000.000	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi PM
1 Dokumen	50.000.000	
2 Kegiatan Usaha	100.000.000	
100%	150.000.000	
1 Dokumen	50.000.000	
1 Dokumen	100.000.000	
30 Investor	350.000.000	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi
50%	350.000.000	
1 Dokumen	70.000.000	
3 Dokumen	280.000.000	
85%	335.173.000	Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM
90%	335.173.000	
12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00	
250 Pelaku Usaha	185.773.000,00	
12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00	
100%	318.362.400	Bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan
100%	318.362.400	

12 Dokumen	318.362.400	
89.00		
4.10	1.913.191.000	Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan
100%	1.913.191.000	
100%		
6.500 Pelaku Usaha	1.275.000.000	
22.000 Kegiatan Usaha	333.000.000	
9.000 Orang	190.191.000	
8 Kegiatan Usaha	115.000.000	
A		
80,1 / A	9.253.073.098	Sekretariat
100%		
100%	161.051.000	
100%		
3 Dokumen	58.564.000	
5 Laporan	102.487.000	
100%	5.453.382.098	
53 Orang/12 Bulan	5.306.972.098	
2 Laporan	73.205.000	
1 Laporan	73.205.000	

100%	82.500.000	
100 Paket	82.500.000	
	1.360.640.000	
27 Paket	190.000.000	
25 Paket	225.000.000	
12 Paket	110.000.000	
12 Dokumen	34.000.000	
12 Laporan	371.640.000	
30 Laporan	430.000.000	
	480.000.000	
10 Unit	150.000.000	
17 Unit	150.000.000	
19 Unit	180.000.000	
100%	715.000.000	
5 Laporan	375.000.000	
8 Laporan	340.000.000	
100%	1.000.500.000	
2 Unit	110.000.000	
1 Unit	115.000.000	
13 Unit	230.500.000	
16 Unit	45.000.000	
134 Unit	110.000.000	
2 Unit	390.000.000	
	12.469.799.498	

Tabel.7.1

Indikator Kinerja Program DPMPTSP Kota Banjarbaru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

[illegible]

Tabel.7.2

Indikator Kinerja Kegiatan DPM&PTSP Kota Banjarbaru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

[illegible]

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
			2021	2022	2023	2024
Penanaman Modal						
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	4%	4%	4%	4%
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi investasi	92.265.139.200	95.955.744.768	99.793.974.559	103.785.733.541
	Meningkatnya investor baru	Jumlah Investor Baru	20 Investor	22 Investor	24 Investor	26 Investor
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Investor yang melaksanakan investasi sesuai ketentuan	75%	77%	79%	81%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.75	88.00	88.25	88.50
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.97	4.00	4.02	4.05
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Kota	B	BB	BB	BB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Daerah (Nilai AKIP)	76,8/BB	77/BB	78/BB	79/BB
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Internal yang di Fasilitasi	100%	100%	100%	100%
Urusan kewenangan yang lainnya mengikuti contoh yang diberikan pada urusan pendidikan						
OPD tertentu yang kalimat tujuannya tidak terdapat dalam Bab 5 dan 6 RPJMD bisa membuat sendiri kalimat pernyataan tujuannya						

un Ke-	
2025	2026
4%	4%
107.937.162.883	112.254.649.398
28 Investor	30 Investor
83%	85%
100%	100%
88.75	89.00
4.07	4.10
A	A
80/A	80,1/A
100%	100%

Tabel 5.1

Misi 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN DENGAN KEARIFAN LOKAL DAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatkan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal		√	√			√
			Peningkatan Pembuatan Peta Potensi Investasi	√	√	√	√	√	√
	Meningkatnya investor baru	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Peningkatan penyelenggaraan promosi penanaman modal	√	√	√	√	√	√
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan Pengelolaan dan dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kab/Kota	√	√	√	√	√	√

Misi 3: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.	√	√	√	√	√	√
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah		Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√

		Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√

Tabel 2.2

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	N/A	4%		4%		4%		4%		4%	
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal		Nilai realisasi investasi	88.716.480.000	92.265.139.200	26.330.000	95.995.744.768	185.000.000	99.793.974.559	300.000.000	103.785.733.541	550.000.000	107.937.162.883	550.000.000
	Peningkatan Pemerian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas/insentif yang diberikan kepada Penanaman Modal	N/A	N/A	-	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000
	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan daerah tentang pemberian insentif yang ditetapkan (target 2022, 2024)	N/A	N/A	-	1 Dokumen	50.000.000			-	-	-	-
			Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan penanaman modal						1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemberian Fasilitas/ Insentif	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM	N/A	N/A	-		-						
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah						2 Kegiatan Usaha	100.000.000	2 Kegiatan Usaha	100.000.000	2 Kegiatan Usaha	100.000.000
	Peningkatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase Peta Potensi dan Peluang Investasi	N/A	100%	26.330.000	100%	135.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal yang Tersusun	N/A	1 Dok	26.330.000	1 Dok (RUPM)	60.000.000						
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah						1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000
	Tersedianya Kajian Potensi dan Peluang Investasi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha (Dokumen Kajian)	N/A	N/A	N/A	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	75.000.000						
			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha						1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
	Meningkatnya Investor Baru	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	18 Investor	20 Investor	343.740.000	22 Investor	354.040.000	24 Investor	550.000.000	26 Investor	470.000.000	28 Investor	350.000.000
	Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Unggulan Daerah yang dipromosikan	N/A	25%	343.740.000	25%	354.040.000	30%	550.000.000	30%	470.000.000	35%	350.000.000
	Terlaksananya Fokum Diskusi/Sosialisasi/Temu Bisnis/kemitraan/pelatihan Terkait Strategi Promosi Penanaman Modal	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Fokum Diskusi/Sosialisasi/Temu Bisnis/kemitraan/pelatihan Terkait Strategi Promosi Penanaman Modal	N/A	1 Dokumen	173.740.000	1 Dokumen	184.040.000						
			Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	70.000.000
	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan selama 1 Tahun	N/A	1 Kali	170.000.000	2 Kali	170.000.000						
			Jumlah dokumen hasil kegiatan hasil promosi penanaman modal Kabupaten/Kota						3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	280.000.000	3 Dokumen	280.000.000
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Investor yang Melaksanakan Investasi sesuai Ketentuan	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	79%	469.695.000	81%	335.173.000	83%	335.173.000
	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang menindak lanjuti rekomendasi TIM	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	79%	469.695.000	81%	335.173.000	83%	335.173.000
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal	Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pemantauan Penanaman modal	1 Dokumen, 35 Proyek PMDN/UMKM	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00						
			Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal						12 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00	12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00

	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman Modal	Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal	1 kali BinteK/sosialisasi	7 kali BinteK/sosialisasi	185.773.000,00	7 kali BinteK/sosialisasi	220.295.000,00						
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal						235 Pelaku Usaha	315.275.000,00	240 Pelaku Usaha	185.773.000,00	245 Pelaku Usaha	185.773.000,00
	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal	35 Perusahaan	25 Perusahaan	99.600.000,00	30 Perusahaan	99.600.000,00						
			Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan						12 Kegiatan Usaha	54.420.000,00	12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00	12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informaasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	350.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000
	Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data yang Terverifikasi	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	350.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000
	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan informasi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Data yang diolah Sesuai dengan Ketentuan	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000						
			Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan						12 Dokumen	350.000.000	12 Dokumen	306.000.000	12 Dokumen	312.120.000

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.61	87.75		88.00		88.25		88.50		88.75		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,95	3.97	1.109.260.000	4.00	1.098.959.950	4.02	1.735.000.000	4.05	1.794.397.000	4.07	1.853.794.000	
	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan	100%	100%	1.109.260.000	100%	1.098.959.950	100%	1.735.000.000	100%	1.794.397.000	100%	1.853.794.000
	Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pengaduan			Persentase Layanan Konsultasi yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti		100%	100%	100%		100%		100%		100%			
	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Elektronik	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Aplikasi yang digunakan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	647.259.500	2 Aplikasi	698.899.500							
			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik						2.500 Pelaku Usaha	1.200.000.000	5.500 Pelaku Usaha	1.225.000.000	6.000 Pelaku Usaha	1.250.000.000	
	Terpenuhinya Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Persentase Komitmen Perizinan dan NonPerizinan yang memenuhi syarat	100%	100%	214.440.500	100%	224.100.450							
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen						12 Kegiatan Usaha	300.000.000	20.000 Kegiatan Usaha	311.000.000	21.000 Kegiatan Usaha	322.000.000	
	Terlaksananya Layanan Konsultasi dan Pengaduan	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Persentase Konsultasi Perizinan yang diproses	100%	100%	247.560.000	100%	125.960.000							
	Persentase Pengaduan yang diproses		100%	100%	100%										
IKM			Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan					2.500 Orang	150.000.000	8.000 Orang	163.397.000	8.500 Orang	176.794.000		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi dan sinkronasi penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Per Tahun)	N/A	N/A	N/A	2 Investor	50.000.000							
			Jumlah kegiatan usaha dari pelau usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan						2 Kegiatan Usaha	85.000.000	4 Kegiatan Usaha	95.000.000	6 Kegiatan Usaha	105.000.000	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kota	B	B		BB		BB		BB		A	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Predikat akuntabilitas perangkat daerah	76,16 / BB	76,8 / BB	7.728.893.028	77 / BB	5.743.260.605	78 / BB	5.616.207.350	79 / BB	6.443.688.085	80 / A	7.016.920.894
		Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Peningkatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	159.237.000	100%	116.000.000	100%	124.000.000	100%	133.100.000	100%
			Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender		100%	100%	100%		100%		100%		100%		
		Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	40.000.000						
				Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen							
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah						2 Dokumen	44.000.000	2 Dokumen	48.400.000	3 Dokumen	53.240.000	
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	124.237.000	5 Dokumen	76.000.000								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5 Laporan	80.000.000	5 Laporan	84.700.000	5 Laporan	93.170.000		

Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	3.926.024.178	100%	3.733.978.555	100%	4.022.207.350	100%	4.446.428.085	100%	4.891.070.894
Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	32 Orang	100%	3.881.024.178	100%	3.688.978.555						
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN						43 Orang/12 Bulan	3.987.207.350	43 Orang/12 Bulan	4.385.928.085	48 Orang/12 Bulan	4.824.520.894
Terlaksananya monitoring capaian kinerja keuangan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD						2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	60.500.000	2 Laporan	66.550.000
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tahunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun diakhir tahun sesuai ketentuan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	60.500.000	1 Laporan	66.550.000
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah												
Terlaksananya Rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah	Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah						5 Laporan	28.170.000				
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	75.000.000	-	-	100%	-	-	0	-	0
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	-	89 Buah	75.000.000	-	-			-	-	-	-
		Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya						85 Paket	75.000.000	-	-	-	-
Peningkatan pengelolaan administrasi umum SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	804.859.850	100%	587.408.050	100%	435.000.000	100%	782.140.000	100%	820.690.000
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 Jenis	20 Jenis	181.299.850	23 Jenis	121.308.850						
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						23 Paket	125.000.000	25 Paket	180.000.000	27 Paket	185.000.000
Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	8 Jenis	16 Jenis	244.822.000	20 Jenis	175.699.200						
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						23 Paket	125.000.000	25 Paket	180.000.000	27 Paket	185.000.000

Terlaksananya penyediaan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	3 Jenis	49840 Lembar	75.000.000	550000 Lembar	50.000.000						
Terlaksananya penyediaan barang cetakan		Jumlah barang cetakan yang tersedia		67 rim		70 Rim							
		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan						1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	60.500.000	1 Laporan	66.500.000
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan yang tersedia	12 Eks	12 Eks	14.760.000	12 Eks	14.760.000						
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang						12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	32.500.000
Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan	N/A	4 Bulan	160.000.000	1 Tahun	100.640.000						
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu						12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	331.640.000	12 Laporan	351.640.000
Terlaksananya perjalanan dinas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	1 Tahun	15 Laporan	128.978.000	20 Laporan	125.000.000						
		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						23 Laporan	300.000.000	26 Laporan	350.000.000	26 Laporan	400.000.000
Peningkatan penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	100%	1.201.428.000	100%	275.000.000	100%	290.000.000	100%	235.000.000	100%	260.000.000
Terlaksananya pengadaan mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu dst) yang dibeli	2 Jenis	11 Buah	189.510.000	7 Buah	75.000.000						
		Jumlah paket mebel yang disediakan						20 Unit	110.000.000	10 Unit	110.000.000	10 Unit	120.000.000
Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	10 Jenis	39 Buah	451.520.000	17 Buah	100.000.000						
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan						17 Unit	180.000.000	15 Unit	125.000.000	15 Unit	140.000.000
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	6 Jenis	39 Buah	560.398.000	17 Buah	100.000.000						
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun						4 Unit	110.000.000	17 Unit	140.000.000	18 Unit	160.000.000
Peningkatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	471.000.000	100%	486.940.000	100%	300.000.000	100%	340.000.000	100%	360.000.000
Terlaksananya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dapat digunakan	4 Jenis	4 Jenis	333.000.000	5 Jenis	287.500.000						
		Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dapat digunakan						5 Laporan	300.000.000	5 Laporan	340.000.000	5 Laporan	360.000.000
Terlaksananya penyediaan pegawai administrasi kantor non ASN dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	15 Orang	15 Orang	138.000.000	4 Orang	199.440.000						
		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Lainnya				13 Orang							
		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan						12 Laporan	305.833.633	8 Laporan	720.000.000	8 Laporan	734.000.000
Peningkatan penggunaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.091.344.000	100%	543.934.000	100%	445.000.000	100%	507.020.000	100%	538.750.000
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Bangunan	-	-	2 Bangunan	75.000.000						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi						3 Unit	100.000.000	2 Unit	93.000.000	2 Unit	98.000.000
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	59.440.000	1 Unit	49.440.000						

		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						1 Unit	50.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	100.000.000
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	11 Unit	12 Unit	156.918.000	11 Unit	134.994.000	11 Unit					
		Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya						13 Unit	175.000.000	13 Unit	190.270.000	13 Unit	200.000.000
Terlaksananya pemeliharaan mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Jenis	4 Buah	7.000.000	6 Buah	4.000.000						
		Jumlah mebel yang dipelihara						10 Unit	20.000.000	12 Unit	35.000.000	14 Unit	40.750.000
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Jenis	117 Buah	217.986.000	117 Buah	80.500.000						
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara						120 Unit	100.000.000	124 Unit	98.750.000	129 Unit	100.000.000
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara	2 Bangunan	2 Bangunan	650.000.000	2 Bangunan	200.000.000						
		Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi						1 Unit	200.000.000	2 Unit	340.000.000	2 Unit	370.500.000
Pengisian kolom tujuan, sasaran, program harus sesuai dengan pengelompokan indikator program yang ada pada Bab IV			TOTAL		10.095.055.028		7.986.355.555		9.020.902.350		9.899.258.085		10.418.007.894

Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
Target	Rp.	
4%		
112.254.649.398	600.000.000	
100%	450.000.000	Bidang Penanaman Modal
1 Dokumen	50.000.000	
2 Kegiatan Usaha	100.000.000	
100%	150.000.000	
1 Dokumen	50.000.000	
1 Dokumen	100.000.000	
30 Investor	350.000.000	Bidang Penanaman
35%	350.000.000	
1 Dokumen	70.000.000	
3 Dokumen	280.000.000	
85%	335.173.000	Bidang Penanaman Modal
85%	335.173.000	
12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00	

250 Pelaku Usaha	185.773.000,00	
12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00	
100%	318.362.400	Bidang Informasi & Pengaduan
100%	318.362.400	
12 Dokumen	318.362.400	

89.00		
4.10	1.913.191.000	Bidang PP, PPT dan IP
100%	1.913.191.000	
100%		
100%		
6.500 Pelaku Usaha	1.275.000.000	
22.000 Kegiatan Usaha	333.000.000	
9.000 Orang	190.191.000	
8 Kegiatan Usaha	115.000.000	
A		
80,1 /A	7.768.073.098	Sekretariat
100%		
100%	161.051.000	
100%		
3 Dokumen	58.564.000	
5 Laporan	102.487.000	

100%	5.380.177.098	
53 Orang/12 Bulan	5.306.972.098	
2 Laporan	73.205.000	
1 Laporan	73.205.000	
100%	82.500.000	
89 Buah	82.500.000	
100 Paket	82.500.000	
	858.845.000	
27 Paket	190.000.000	
27 Paket	190.000.000	

1 Laporan	73.205.000	
12 Dokumen	34.000.000	
12 Laporan	371.640.000	
30 Laporan	430.000.000	
	300.000.000	
10 Unit	150.000.000	
17 Unit	150.000.000	
19 Unit	180.000.000	
100%	375.000.000	
5 Laporan	375.000.000	
8 Laporan	340.000.000	
100%	610.500.000	
2 Unit	110.000.000	

1 Unit	115,000.000	
13 Unit	230,500.000	
16 Unit	45,000.000	
134 Unit	110,000.000	
2 Unit	390,000.000	
	11,284,799.498	

Tabel.7.1

[illegible]

Tabel.7.2

Indikator Kinerja Kegiatan DPM&PTSP Kota Banjarbaru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

[illegible]

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
			2021	2022	2023	2024
Penanaman Modal						
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	4%	4%	4%	4%
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi investasi	92.265.139.200	95.955.744.768	99.793.974.559	103.785.733.541
	Meningkatnya investor baru	Jumlah Investor Baru	20 Investor	22 Investor	24 Investor	26 Investor
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Investor yang melaksanakan investasi sesuai ketentuan	75%	77%	79%	81%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.75	88.00	88.25	88.50
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.97	4.00	4.02	4.05
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Kota	B	BB	BB	BB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Daerah (Nilai AKIP)	76,8/BB	77/BB	78/BB	79/BB
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Internal yang di Fasilitasi	100%	100%	100%	100%
Urusan kewenangan yang lainnya mengikuti contoh yang diberikan pada urusan pendidikan						
OPD tertentu yang kalimat tujuannya tidak terdapat dalam Bab 5 dan 6 RPJMD bisa membuat sendiri kalimat pernyataan tujuannya						

un Ke-	
2025	2026
4%	4%
107.937.162.883	112.254.649.398
28 Investor	30 Investor
83%	85%
100%	100%
88.75	89.00
4.07	4.10
A	A
80/A	80,1/A
100%	100%

Tabel 5.1

Misi 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN DENGAN KEARIFAN LOKAL DAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatkan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal		√	√			√
			Peningkatan Pembuatan Peta Potensi Investasi	√	√	√	√	√	√
	Meningkatnya investor baru	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Peningkatan penyelenggaraan promosi penanaman modal	√	√	√	√	√	√
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan Pengelolaan dan dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kab/Kota	√	√	√	√	√	√

Misi 3: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.	√	√	√	√	√	√
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah		Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√
			Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√

		Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√

Tabel 2.2

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	N/A	4%		4%		4%		4%		4%	
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal		Nilai realisasi investasi	88.716.480.000	92.265.139.200	26.330.000	95.995.744.768	185.000.000	99.793.974.559	300.000.000	103.785.733.541	550.000.000	107.937.162.883	550.000.000
	Peningkatan Pemerian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas/insentif yang diberikan kepada Penanaman Modal	N/A	N/A	-	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000
	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan daerah tentang pemberian insentif yang ditetapkan (target 2022, 2024)	N/A	N/A	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemberian Fasilitas/Insentif	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM	N/A	N/A	-	-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000
	Peningkatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase Peta Potensi dan Peluang Investasi	N/A	100%	26.330.000	100%	135.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal yang Tersusun	N/A	1 Dok	26.330.000	1 Dok (RUPM)	60.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
	Tersedianya Kajian Potensi dan Peluang Investasi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha (Dokumen Kajian)	N/A	N/A	N/A	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	75.000.000	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	100.000.000	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	100.000.000	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	100.000.000
	Meningkatnya Investor Baru	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	18 Investor	20 Investor	343.740.000	22 Investor	354.040.000	24 Investor	400.000.000	26 Investor	320.000.000	28 Investor	320.000.000
	Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Unggulan Daerah yang dipromosikan	N/A	25%	343.740.000	25%	354.040.000	30%	400.000.000	30%	320.000.000	35%	320.000.000
	Terlaksananya Fokum Diskusi/Sosialisasi/ Temu Bisnis/kemitraan/pelatihan Terkait Strategi Promosi Penanaman Modal	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Fokum Diskusi/Sosialisasi/ Temu Bisnis/kemitraan/pelatihan Terkait Strategi Promosi Penanaman Modal	N/A	1 Dokumen	173.740.000	1 Dokumen	184.040.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000
	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan selama 1 Tahun	N/A	1 Kali	170.000.000	2 Kali	170.000.000	2 Kali	210.000.000	2 Kali	250.000.000	2 Kali	250.000.000
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Investor yang Melaksanakan Investasi sesuai Ketentuan	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	79%	335.173.000	81%	335.173.000	83%	335.173.000
	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang menindak lanjuti rekomendasi TIM	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	79%	335.173.000	81%	335.173.000	83%	335.173.000
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal	Koordinasi dan sinkronasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pemantauan Penanaman modal	1 Dokumen, 35 Proyek PMDN/UMKM	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00
	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman Modal	Koordinasi dan sinkronasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal	1 kali BinteK/sosialisasi	7 kali BinteK/sosialisasi	185.773.000,00	7 kali BinteK/sosialisasi	220.295.000,00	7 kali BinteK/sosialisasi	185.773.000,00	7 kali BinteK/sosialisasi	185.773.000,00	7 kali BinteK/sosialisasi	185.773.000,00
	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	Koordinasi dan sinkronasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal	35 Perusahaan	25 Perusahaan	99.600.000,00	30 Perusahaan	99.600.000,00	35 Perusahaan	99.600.000,00	40 Perusahaan	99.600.000,00	45 Perusahaan	99.600.000,00
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informaasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru (Up To Date)	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	300.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000
	Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data yang Terverifikasi	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	300.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000
	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan informasi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Data yang diolah Sesuai dengan Ketentuan	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	300.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.61	87.75		88.00		88.25		88.50		88.75	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,95	3,97	1.109.260.000	4,00	1.098.959.950	4,02	1.181.327.301	4,05	1.240.724.301	4,07	1.300.121.301
	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan	100%	100%	1.109.260.000	100%	1.098.959.950	100%	1.181.327.301	100%	1.240.724.301	100%	1.300.121.301
	Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pengaduan		Persentase Layanan Konsultasi yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Elektronik	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Aplikasi yang digunakan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	647.259.500	2 Aplikasi	698.899.500	2 Aplikasi	723.899.500	2 Aplikasi	748.899.500	2 Aplikasi	773.899.500
	Terpenuhinya Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Persentase Komitmen Perizinan dan NonPerizinan yang memenuhi syarat	100%	100%	214.440.500	100%	224.100.450	100%	247.070.801	100%	258.070.801	100%	269.070.801
	Terlaksananya Layanan Konsultasi dan Pengaduan	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Persentase Konsultasi Perizinan yang diproses	100%	100%	247.560.000	100%	125.960.000	100%	125.357.000	100%	138.754.000	100%	152.151.000
IKM			Persentase Pengaduan yang diproses	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Fasilitas /Insentif Daerah	Koordinasi dan sinkronasi penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Fasilitas /Insentif Daerah (Per Tahun)	N/A	N/A	N/A	2 Investor	50.000.000	2 Investor	85.000.000	3 Investor	95.000.000	3 Investor	105.000.000
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kota	B	B		BB		BB		BB		A	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Predikat akuntabilitas perangkat daerah	76,16 / BB	76,8 / BB	7.728.893.028	77 / BB	5.743.260.605	78 / BB	7.420.477.350	79 / BB	7.999.688.085	80 / A	8.579.420.894
	Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Peningkatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	159.237.000	100%	116.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000
			Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	44.000.000	2 Dokumen	48.400.000	2 Dokumen	53.240.000
			Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	124.237.000	5 Dokumen	76.000.000	5 Dokumen	77.000.000	5 Dokumen	84.700.000	5 Dokumen	93.170.000
	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	3.926.024.178	100%	3.733.978.555	100%	4.097.207.350	100%	4.506.928.085	100%	4.957.620.894
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	32 Orang	100%	3.881.024.178	100%	3.688.978.555	100%	3.987.207.350	100%	4.385.928.085	100%	4.824.520.894
	Terlaksananya monitoring capaian kinerja keuangan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	60.500.000	2 Laporan	66.550.000
	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tahunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun diakhir tahun sesuai ketentuan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.500.000	1 Laporan	66.550.000
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	75.000.000	-	-	100%	75.000.000	-	0	-	0
	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	-	89 Buah	75.000.000	-	-	89 Buah	75.000.000	-	-	-	-
	Peningkatan pengelolaan administrasi umum SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	804.859.850	100%	587.408.050	100%	1.066.640.000	100%	1.176.640.000	100%	1.286.140.000
	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 Jenis	20 Jenis	181.299.850	23 Jenis	121.308.850	23 Jenis	170.000.000	24 Jenis	180.000.000	24 Jenis	185.000.000
	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	8 Jenis	16 Jenis	244.822.000	20 Jenis	175.699.200	23 Jenis	190.000.000	25 Jenis	200.000.000	28 Jenis	222.000.000

Terlaksananya penyediaan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	3 Jenis	49840 Lembar	75.000.000	550000 Lembar	50.000.000	7 Jenis	70.000.000	7 Jenis	85.000.000	10 Jenis	95.000.000
Terlaksananya penyediaan barang cetakan		Jumlah barang cetakan yang tersedia		67 rim		70 Rim		73 Rim		76 Rim		79 Rim	
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan yang tersedia	12 Eks	12 Eks	14.760.000	12 Eks	14.760.000	12 Eks	25.000.000	12 Eks	30.000.000	12 Eks	32.500.000
Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan	N/A	4 Bulan	160.000.000	1 Tahun	100.640.000	1 Tahun	311.640.000	1 Tahun	331.640.000	1 Tahun	351.640.000
Terlaksananya perjalanan dinas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	1 Tahun	15 Laporan	128.978.000	20 Laporan	125.000.000	25 Laporan	300.000.000	30 Laporan	350.000.000	35 Laporan	400.000.000
Peningkatan penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	100%	1.201.428.000	100%	275.000.000	100%	310.000.000	100%	276.000.000	100%	186.000.000
Terlaksananya pengadaan mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu dst) yang dibeli	2 Jenis	11 Buah	189.510.000	7 Buah	75.000.000	10 Buah	90.000.000	10 Buah	11.000.000	12 Buah	12.000.000
Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	10 Jenis	39 Buah	451.520.000	17 Buah	100.000.000	17 Buah	110.000.000	22 Buah	125.000.000	25 Buah	14.000.000
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	6 Jenis	39 Buah	560.398.000	17 Buah	100.000.000	25 Buah	110.000.000	27 Buah	140.000.000	27 Buah	160.000.000
Peningkatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	471.000.000	100%	486.940.000	100%	1.000.630.000	100%	1.060.000.000	100%	1.094.000.000
Terlaksananya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dapat digunakan	4 Jenis	4 Jenis	333.000.000	5 Jenis	287.500.000	5 Jenis	300.000.000	5 Jenis	340.000.000	5 Jenis	360.000.000
Terlaksananya penyediaan pegawai administrasi kantor non ASN dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	15 Orang	15 Orang	138.000.000	4 Orang	199.440.000	38 Orang	700.630.000	40 Orang	720.000.000	40 Orang	734.000.000
		Jumlah Jasa Pelayan Umum Kantor Lainnya				13 Orang		13 Orang		13 Orang		13 Orang	
Peningkatan penggunaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.091.344.000	100%	543.934.000	100%	750.000.000	100%	847.020.000	100%	909.250.000
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Bangunan	-	-	2 Bangunan	75.000.000	2 Bangunan	80.000.000	2 Bangunan	93.000.000	2 Bangunan	98.000.000
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	59.440.000	1 Unit	49.440.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	100.000.000
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	11 Unit	12 Unit	156.918.000	11 Unit	134.994.000	11 Unit	175.000.000	11 Unit	190.270.000	11 Unit	200.000.000
Terlaksananya pemeliharaan mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Jenis	4 Buah	7.000.000	6 Buah	4.000.000	7 Buah	20.000.000	8 Buah	35.000.000	8 Buah	40.750.000
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Jenis	117 Buah	217.986.000	117 Buah	80.500.000	119 Buah	100.000.000	119 Buah	98.750.000	119 Buah	100.000.000
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara	2 Bangunan	2 Bangunan	650.000.000	2 Bangunan	200.000.000	2 Bangunan	300.000.000	2 Bangunan	340.000.000	2 Bangunan	370.500.000
Pengisian kolom tujuan, sasaran, program harus sesuai dengan pengelompokan indikator program yang ada pada Bab IV					TOTAL	10.095.055.028		7.986.355.555	9.936.977.651		10.751.585.386		11.396.835.195

Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
Target	Rp.	
4%		
112.254.649.398	600.000.000	
100%	450.000.000	Bidang Penanaman Modal
1 Dokumen	50.000.000	
1 Laporan	100.000.000	
100%	150.000.000	
1 Laporan	50.000.000	
1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	100.000.000	
30 Investor	320.000.000	Bidang Penanaman
35%	320.000.000	
1 Dokumen	70.000.000	
2 Kali	250.000.000	
85%	335.173.000	Bidang Penanaman Modal
85%	335.173.000	
43 Kali	49.800.000,00	
7 kali Bintek/sosialisasi	185.773.000,00	
50 Perusahaan	99.600.000,00	
100%	318.362.400	Bidang Informasi & Pengaduan
100%	318.362.400	
100%	318.362.400	

89,00		
4.10	1.359.518.301	Bidang PP, PPT dan IP
100%	1.359.518.301	
100%		
100%		
2 Aplikasi	798.899.500	
100%	280.070.801	
100%	165.548.000	
100%		
4 Investor	115.000.000	
A		
80,1 /A	9.253.073.098	Sekretariat
100%		
100%	161.051.000	
100%		
3 Dokumen	58.564.000	
1 Dokumen		
5 Dokumen	102.487.000	
100%	5.453.382.098	
100%	5.306.972.098	
2 Laporan	73.205.000	
1 Laporan	73.205.000	
100%	82.500.000	
89 Buah	82.500.000	
	1.360.640.000	
24 Jenis	190.000.000	
28 Jenis	225.000.000	

10 Jenis	110.000.000	
82 Rim		
12 Eks	34.000.000	
1 Tahun	371.640.000	
40 Laporan	430.000.000	
	480.000.000	
12 Buah	150.000.000	
25 Buah	150.000.000	
30 Buah	180.000.000	
100%	715.000.000	
5 Jenis	375.000.000	
40 Orang	340.000.000	
13 Orang		
100%	1.000.500.000	
2 Bangunan	110.000.000	
1 Unit	115.000.000	
11 Unit	230.500.000	
8 Buah	45.000.000	
119 Buah	110.000.000	
2 Bangunan	390.000.000	
	12.186.126.799	

Tabel.7.1

Indikator Kinerja Program DPMPTSP Kota Banjarbaru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

[illegible]

Tabel.7.2

Indikator Kinerja Kegiatan DPM&PTSP Kota Banjarbaru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

[illegible]

Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	N/A	4%		46,5%		65,70%		75%		85%	
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal		Nilai realisasi investasi	88.716.480.000	92.265.139.200	26.330.000	130.000.000.000	185.000.000	147.000.000.000	300.000.000	155.519.989.440	250.000.000	164.125.488.000	250.000.000
	Peningkatan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	N/A	N/A	-	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
	Ditetapkannya kebijakan daerah tentang pemberian insentif yang tersusun	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan penanaman modal	N/A	N/A	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-
	Terlaksananya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan usaha di daerah	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	N/A	N/A	-	-	-	2 Kegiatan Usaha	100.000.000	2 Kegiatan Usaha	100.000.000	2 Kegiatan Usaha	100.000.000
	Peningkatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase Peta Potensi dan Peluang Investasi	N/A	100%	26.330.000	100%	135.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000
	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	N/A	1 Dok	26.330.000	1 Dok (RUPM)	60.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000
	Tersedianya kajian potensi dan peluang investasi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha	N/A	N/A	N/A	1 Dok (Kajian Potensi Investasi)	75.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
	Meningkatnya Investor Baru	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	18 Investor	20 Investor	343.740.000	22 Investor	354.040.000	24 Investor	550.000.000	26 Investor	470.000.000	28 Investor	350.000.000
	Peningkatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Unggulan Daerah yang dipromosikan	N/A	25%	343.740.000	25%	354.040.000	50%	550.000.000	50%	470.000.000	50%	350.000.000
	Tersusunnya Peraturan Daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	173.740.000	1 Dokumen	184.040.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	70.000.000
	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan hasil promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	N/A	1 Kali	170.000.000	2 Dokumen	170.000.000	3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	280.000.000	3 Dokumen	280.000.000
	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penanam Modal yang melaksanakan kegiatan investasi sesuai ketentuan	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	79%	469.695.000	81%	335.173.000	83%	335.173.000
	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	N/A	75%	335.173.000	77%	369.695.000	80%	469.695.000	85%	335.173.000	85%	335.173.000
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1 Dokumen, 35 Proyek PMDN/UMKM	12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00	43 Kali	49.800.000,00	12 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00	12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal bagi pelaku usaha	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1 kali BinteK/ sosialisas i	7 kali BinteK/ sosialisasi	185.773.000,00	225 Pelaku Usaha	220.295.000,00	235 Pelaku Usaha	315.275.000,00	240 Pelaku Usaha	185.773.000,00	245 Pelaku Usaha	185.773.000,00
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	35 Perusahaan	25 Perusahaan	99.600.000,00	12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00	12 Kegiatan Usaha	54.420.000,00	12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00	12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	350.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000
	Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah data yang diolah, dikaji dan di manfaatkan	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	100%	350.000.000	100%	306.000.000	100%	312.120.000

	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dioalah, dikaji dan dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dioalah, dikaji dan dimanfaatkan	N/A	100%	551.659.000	100%	235.400.000	12 Dokumen	350.000.000	12 Dokumen	306.000.000	12 Dokumen	312.120.000
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.61	87.75		90.0		90		88.50		88.75	
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,95	3.97	1.109.260.000	4.52	1.098.959.950	4.52	1.735.000.000	4.05	1.794.397.000	4.07	1.853.794.000
	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Felayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan	100%	100%	1.109.260.000	100%	1.098.959.950	100%	1.735.000.000	100%	1.794.397.000	100%	1.853.794.000
	Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pengaduan		Persentase Layanan Konsultasi dan pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
IKM	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2 Aplikasi	2 Aplikasi	647.259.500	4500 Pelaku Usaha	698.899.500	2.500 Pelaku Usaha	1.200.000.000	5.500 Pelaku Usaha	1.225.000.000	6.000 Pelaku Usaha	1.250.000.000
	Terlaksananya pemantauan pemenuhan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100%	100%	214.440.500	18.000 Kegiatan Usaha	224.100.450	12 Kegiatan Usaha	300.000.000	20.000 Kegiatan Usaha	311.000.000	21.000 Kegiatan Usaha	322.000.000
	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	100%	100%	247.560.000	7.000 Orang	125.960.000	2.500 Orang	150.000.000	8.000 Orang	163.397.000	8.500 Orang	176.794.000
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan Pemberian fasilitas/insentif daerah bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	N/A	N/A	N/A	2 Kegiatan Usaha	50.000.000	2 Kegiatan Usaha	85.000.000	4 Kegiatan Usaha	95.000.000	6 Kegiatan Usaha	105.000.000
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kota	B	B		BB		BB		BB		A	
			Predikat akuntabilitas perangkat daerah	76,16 / BB	76,8 / BB	7.728.893.028	77 / BB	5.743.260.605	78 / BB	6.742.040.983	79 / BB	8.098.688.085	80 / A	8.813.420.894
	Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Peningkatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	159.237.000	100%	116.000.000	100%	124.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000
			Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	44.000.000	2 Dokumen	48.400.000	3 Dokumen	53.240.000
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	124.237.000	5 Dokumen	76.000.000	5 Laporan	80.000.000	5 Laporan	84.700.000	5 Laporan	93.170.000
	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	3.926.024.178	100%	3.733.978.555	100%	4.067.207.350	100%	4.506.928.085	100%	4.957.620.894
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang	100%	3.881.024.178	100%	3.688.978.555	43 Orang/12 Bulan	3.987.207.350	43 Orang/12 Bulan	4.385.928.085	48 Orang/12 Bulan	4.824.520.894
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	60.500.000	2 Laporan	66.550.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	60.500.000	1 Laporan	66.550.000

Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	75.000.000	-	-	100%	75.000.000	-	0	-	0
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	-	89 Buah	75.000.000	-	-	85 Paket	75.000.000	-	-	-	-
Peningkatan pengelolaan administrasi umum SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	804.859.850	100%	587.408.050	100%	825.000.000	100%	1.176.640.000	100%	1.286.140.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	20 Jenis	181.299.850	23 Jenis	121.308.850	23 Paket	125.000.000	25 Paket	180.000.000	27 Paket	185.000.000
Tersedianya bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Jenis	16 Jenis	244.822.000	20 Jenis	175.699.200	22 Paket	190.000.000	25 Paket	200.000.000	25 Paket	222.000.000
Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	49840 Lembar	75.000.000	550000 Lembar	50.000.000	12 Paket	70.000.000	13 Paket	85.000.000	12 Paket	95.000.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 Eks	12 Eks	14.760.000	12 Eks	14.760.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	32.500.000
Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	N/A	4 Bulan	160.000.000	1 Tahun	100.640.000	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	331.640.000	12 Laporan	351.640.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	15 Laporan	128.978.000	20 Laporan	125.000.000	23 Laporan	300.000.000	26 Laporan	350.000.000	26 Laporan	400.000.000
Peningkatan penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100%	100%	1.201.428.000	100%	275.000.000	100%	400.000.000	100%	375.000.000	100%	420.000.000
Tersedianya mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Jenis	11 Buah	189.510.000	7 Buah	75.000.000	20 Unit	110.000.000	10 Unit	110.000.000	10 Unit	120.000.000
Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Jenis	39 Buah	451.520.000	17 Buah	100.000.000	17 Unit	180.000.000	15 Unit	125.000.000	15 Unit	140.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	6 Jenis	39 Buah	560.398.000	17 Buah	100.000.000	4 Unit	110.000.000	17 Unit	140.000.000	18 Unit	160.000.000
Peningkatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	471.000.000	100%	486.940.000	100%	605.833.633	100%	1.060.000.000	100%	1.094.000.000
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dapat digunakan	4 Jenis	4 Jenis	333.000.000	5 Jenis	287.500.000	5 Laporan	300.000.000	5 Laporan	340.000.000	5 Laporan	360.000.000
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	15 Orang	15 Orang	138.000.000	4 Orang	199.440.000	12 Laporan	305.833.633	8 Laporan	720.000.000	8 Laporan	734.000.000
Peningkatan penggunaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.091.344.000	100%	543.934.000	100%	645.000.000	100%	847.020.000	100%	909.250.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Bangunan	-	-	2 Bangunan	75.000.000	3 Unit	100.000.000	2 Unit	93.000.000	2 Unit	98.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	59.440.000	1 Unit	49.440.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	100.000.000
Tersedianya Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit	12 Unit	156.918.000	11 Unit	134.994.000	13 Unit	175.000.000	13 Unit	190.270.000	13 Unit	200.000.000
Terlaksananya pemeliharaan mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Jenis	4 Buah	7.000.000	6 Buah	4.000.000	10 Unit	20.000.000	12 Unit	35.000.000	14 Unit	40.750.000
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Jenis	117 Buah	217.986.000	117 Buah	80.500.000	120 Unit	100.000.000	124 Unit	98.750.000	129 Unit	100.000.000
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Bangunan	2 Bangunan	650.000.000	2 Bangunan	200.000.000	1 Unit	200.000.000	2 Unit	340.000.000	2 Unit	370.500.000
Pengisian kolom tujuan, sasaran, program harus sesuai dengan pengelompokan indikator program yang ada pada Bab IV			TOTAL		10.095.055.028		7.986.355.555		10.146.735.983		11.254.258.085		11.914.507.894

Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
Target	Rp.	
100%		
177.432.960.000	300.000.000	
100%	150.000.000	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi PM
1 Dokumen	50.000.000	
2 Kegiatan Usaha	100.000.000	
100%	150.000.000	
1 Dokumen	50.000.000	
1 Dokumen	100.000.000	
30 Investor	350.000.000	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi
50%	350.000.000	
1 Dokumen	70.000.000	
3 Dokumen	280.000.000	
85%	335.173.000	Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM
90%	335.173.000	
12 Kegiatan Usaha	49.800.000,00	
250 Pelaku Usaha	185.773.000,00	
12 Kegiatan Usaha	99.600.000,00	
100%	318.362.400	Bidang Kebijakan, Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan
100%	318.362.400	

12 Dokumen	318.362.400	
89.00		
4.10	1.913.191.000	Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pengaduan
100%	1.913.191.000	
100%		
6.500 Pelaku Usaha	1.275.000.000	
22.000 Kegiatan Usaha	333.000.000	
9.000 Orang	190.191.000	
8 Kegiatan Usaha	115.000.000	
A		
80,1 / A	9.253.073.098	Sekretariat
100%		
100%	161.051.000	
100%		
3 Dokumen	58.564.000	
5 Laporan	102.487.000	
100%	5.453.382.098	
53 Orang/12 Bulan	5.306.972.098	
2 Laporan	73.205.000	
1 Laporan	73.205.000	

100%	82.500.000	
100 Paket	82.500.000	
	1.360.640.000	
27 Paket	190.000.000	
25 Paket	225.000.000	
12 Paket	110.000.000	
12 Dokumen	34.000.000	
12 Laporan	371.640.000	
30 Laporan	430.000.000	
	480.000.000	
10 Unit	150.000.000	
17 Unit	150.000.000	
19 Unit	180.000.000	
100%	715.000.000	
5 Laporan	375.000.000	
8 Laporan	340.000.000	
100%	1.000.500.000	
2 Unit	110.000.000	
1 Unit	115.000.000	
13 Unit	230.500.000	
16 Unit	45.000.000	
134 Unit	110.000.000	
2 Unit	390.000.000	
	12.469.799.498	